

Katalog : 4102004.3308

# INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT



# KABUPATEN MAGELANG 2019



BADAN PUSAT STATISTIK  
KABUPATEN MAGELANG



# INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT



## KABUPATEN MAGELANG 2019

## **INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KABUPATEN MAGELANG 2019**

ISBN : 978-623-94353-8-7  
No. Publikasi : 33080.2044  
Katalog : 4102004.3308  
Ukuran Buku : 18,2 x 25,7 cm  
Jumlah Halaman : xii + 68 halaman

Naskah :  
BPS Kabupaten Magelang

Penyunting :  
BPS Kabupaten Magelang

Desain Kover oleh :  
BPS Kabupaten Magelang

Penerbit :  
© BPS Kabupaten Magelang

Pencetak :  
TM Percetakan

Sumber Ilustrasi : -

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengkomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

## TIM PENYUSUN

**Penanggung jawab :**

Ir. Sri Wiyadi, MM

**Penyunting :**

Lutfiah Adela Arzie, SST

**Penulis :**

Eko Hermawati AS, SST

**Pengolah data :**

Eko Hermawati AS, SST

**Pembuat Infografis dan Gambar Kulit :**

Restu Asih Trianto, SST, MM

<https://magelangkab.bps.go.id>

## KATA PENGANTAR

Publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Magelang 2019 merupakan publikasi yang menyajikan tingkat perkembangan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Magelang, perkembangannya antarwaktu, dan perbandingannya antardaerah tempat tinggal (perdesaan dan perkotaan). Data yang digunakan bersumber dari BPS, Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magelang, dan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang. Data BPS tersebut bersumber dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), serta Proyeksi Penduduk 2011-2035.

Publikasi ini menyajikan berbagai aspek kesejahteraan yang datanya tersedia dan terukur. Untuk memudahkan interpretasi, perubahan taraf kesejahteraan dikaji menurut delapan bidang yang mencakup Kependudukan, Kesehatan dan Gizi, Pendidikan, Ketenagakerjaan, Taraf dan Pola Konsumsi, Perumahan dan Lingkungan, Kemiskinan, serta Sosial Lainnya, yang dapat digunakan sebagai acuan dalam upaya peningkatan kualitas hidup. Publikasi ini diharapkan dapat digunakan untuk bahan kajian, perencanaan dan evaluasi berbagai macam program pembangunan yang telah dijalankan.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu pembuatan publikasi ini, sehingga penerbitan publikasi ini dapat terlaksana. Semoga publikasi ini bermanfaat bagi pengguna data.

Kota Mungkid, November 2020  
KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK  
KABUPATEN MAGELANG



Ir. Sri Wiyadi, MM

## DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar .....	iv
Daftar Isi .....	v
Daftar Tabel .....	vi
Daftar Gambar .....	viii
Bab 1. Kependudukan .....	2
Bab 2. Kesehatan dan Gizi .....	13
Bab 3. Pendidikan.....	21
Bab 4. Ketenagakerjaan .....	36
Bab 5. Taraf dan Pola Konsumsi .....	44
Bab 6. Perumahan dan Lingkungan .....	49
Bab 7. Kemiskinan .....	59
Bab 8. Perlindungan Sosial .....	63
Bab 9. Sosial Lainnya .....	65

## DAFTAR TABEL

	Halaman
<b>BAB 1. Kependudukan</b>	
Tabel 1.1 Rasio Ketergantungan dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan Kabupaten Magelang, 2019.....	5
Tabel 1.2 Kepadatan Penduduk Kabupaten Magelang Menurut Kecamatan, 2019 (Jiwa/Km <sup>2</sup> ).....	6
Tabel 1.3 Komposisi Penduduk dan Angka Beban Ketergantungan Kabupaten Magelang 2013-2019 .....	9
Tabel 1.4 Persentase Penduduk Wanita Umur 10+ Tahun ke Atas yang Pernah Kawin dan Rata-Rata Umur Perkawinan Pertama di Kabupaten Magelang, 2013-2019 (%).....	10
<b>BAB 2. Kesehatan dan Gizi</b>	
Tabel 2.1 Persentase Penduduk yang Berobat Jalan Menurut Tempat Berobat di Kabupaten Magelang, 2017-2019 .....	19
<b>BAB 3. Pendidikan</b>	
Tabel 3.1 Angka Melek Huruf Menurut Kelompok Umur, Jenis Kelamin, dan Daerah Tempat Tinggal di Kabupaten Magelang, 2019 .....	23
Tabel 3.2 Persentase Penduduk usia 15 tahun ke Atas menurut Tipe daerah dan Jenjang Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan di Kabupaten Magelang, 2017-2019.....	26
Tabel 3.3 APS menurut Usia Sekolah, Jenis Kelamin, dan Daerah Tempat Tinggal di Kabupaten Magelang, 2016-2019 .....	30
Tabel 3.4 APM menurut Usia Sekolah, Jenis Kelamin, dan Daerah Tempat Tinggal di Kabupaten Magelang, 2016-2019 .....	31

#### **BAB 4. Ketenagakerjaan**

Tabel 4.1	Penduduk Kabupaten Magelang Berumur 15 Tahun ke Atas dan Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu, 2019.....	36
Tabel 4.2	Penduduk Kabupaten Magelang Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Berdasarkan Lapangan Usaha dan Tipe Daerah, 2019.....	41

#### **BAB 5. Taraf dan Pola Konsumsi**

Tabel 5.1	Rata-rata Pengeluaran Per kapita Sebulan menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Magelang, 2017-2019.....	44
Tabel 5.2	Rata-rata Konsumsi Energi dan Protein Per kapita Perhari di Kabupaten Magelang, 2017-2019 .....	47



## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Indikator-Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Magelang Tahun 2019	1
<b>BAB 1. Kependudukan</b>	
Gambar 1.1 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Magelang, 2013- 2019. ....	2
Gambar 1.2 Piramida Penduduk Kabupaten Magelang, 2019.....	3
Gambar 1.3 Angka Beban Ketergantungan Penduduk Kabupaten Magelang 2013-2019 .....	8
Gambar 1.4 Persentase Wanita Berumur 15-49 Tahun dan Kawin yang Sedang Menggunakan Alat/Cara Kontrasepsi di Kabupaten Magelang, 2018-2019 .....	12
<b>BAB 2. Kesehatan dan Gizi</b>	
Gambar 2.1 Angka Kesakitan dalam Satu Bulan Terakhir di Kabupaten Magelang, 2016-2019.....	14
Gambar 2.2 Angka Harapan Hidup Kabupaten Magelang, 2013-2019 (Tahun).....	15
Gambar 2.3 Penduduk yang Mengalami Keluhan Kesehatan di Kabupaten Magelang, 2019.....	16
Gambar 2.4 Persentase Penduduk yang Mengalami Keluhan Kesehatan dalam Sebulan Terakhir yang Berobat Jalan dan Tidak Berobat Jalan menurut Daerah Tempat Tinggal di Kabupaten Magelang, 2017 – 2019 (%).....	17
Gambar 2.5 Persentase Penduduk yang Memiliki Jaminan Kesehatan menurut Daerah Tempat Tinggal di Kabupaten Magelang, 2019.....	18

### **BAB 3. Pendidikan**

Gambar 3.1	Perkembangan Angka Melek Huruf Penduduk 15 Tahun ke Atas di Kabupaten Magelang, 2017-2019(%).....	22
Gambar 3.2	Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah (tahun) di Kabupaten Magelang, 2015-2019.....	25
Gambar 3.3	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas menurut Tipe Daerah dan Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kabupaten Magelang.....	27
Gambar 3.4	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Berdasarkan Tipe Daerah dan Kelompok Umur di Kabupaten Magelang, 2019.....	29
Gambar 3.5	Perkembangan Rasio Murid Guru dan Guru Sekolah di Kabupaten Magelang, 2015/2016-2019/2020.....	33
Gambar 3.6	Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Berusia 25 Tahun ke Atas 2017-2019.....	34

### **BAB 4. Ketenagakerjaan**

Gambar 4.1	Perkembangan TPAK dan TPT (%) di Kabupaten Magelang, 2014-2019.....	38
Gambar 4.2	Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu Lalu Menurut Kelompok Lapangan Usaha di Kabupaten Magelang, 2019 .....	39
Gambar 4.3	Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang lalu Menurut Status Pekerjaan Utama di Kabupaten Magelang, 2019 .....	42

### **BAB 5. Taraf dan Pola Konsumsi**

Gambar 5.1	Rata-rata Pengeluaran Makanan per Kapita per Bulan Menurut Kelompok Komoditas dan Daerah Tempat Tinggal Kabupaten Magelang, 2019.....	45
------------	---	----

## **BAB 6. Perumahan dan Lingkungan**

Gambar 6.1	Persentase Rumah Tangga Menurut Status Kepemilikan Rumah Tinggal di Kabupaten Magelang, 2017-2019 .....	49
Gambar 6.2	Persentase Rumah Tangga Berdasarkan Jenis Dinding Terluas, Atap Terluas, dan Lantai Terluas Bangunan Tempat Tinggal di Kabupaten Magelang, 2019 (%) .....	50
Gambar 6.3	Persentase Rumah Tangga Berdasarkan Sumber Air Minum dan Jarak Sumber Air Minum ke Tempat Penampungan Kotoran/Tinja di Kabupaten Magelang, 2019 .....	51
Gambar 6.4	Persentase Rumah Tangga Berdasarkan Fasilitas Buang Air Besar, Jenis Kloset, dan Tempat Pembuangan Akhir Tinja di Kabupaten Magelang, 2019.....	52
Gambar 6.5	Persentase Rumah Tangga Menurut Beberapa Indikator Kualitas Perumahan di Kabupaten Magelang, 2016-2019 .....	52
Gambar 6.6	Persentase Rumah Tangga Menurut Luas Lantai per Kapita di Kabupaten Magelang, 2019.....	53
Gambar 6.7	Persentase Rumah Tangga Menurut Beberapa Fasilitas Perumahan di Kabupaten Magelang, 2019.....	55

## **BAB 7. Kemiskinan**

Gambar 7.1	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Magelang, 2015-2019.....	59
Gambar 7.2	Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan, dan Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Magelang, 2015-2019.....	61

## **BAB 8. Perlindungan Sosial**

Gambar 8.1	Persentase Rumah Tangga Penerima Program Perlindungan Sosial di Kabupaten Magelang, 2019.....	63
------------	---	----

## **BAB 9. Sosial Lainnya**

Gambar 9.1 Persentase Rumah Tangga dengan Penguasaan/Kepemilikan Telepon, Telepon Seluler dan Komputer/Laptop di Kabupaten Magelang, 2015-2019.....

66

<https://magelangkab.bps.go.id>



# INDIKATOR-INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2019

## RASIO KETERGANTUNGAN (DEPENDENCY RATIO)

**44,81%**

Rasio Ketergantungan (Dependency Ratio) adalah perbandingan antara jumlah penduduk umur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun ke atas (keduanya disebut dengan bukan angkatan kerja) dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun (angkatan kerja)

## TINGKAT PARTISIPASI ANGGKATAN KERJA (TPAK)

**74,55**

TPAK merupakan persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang merupakan angkatan kerja. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi disuatu negara/wilayah.

TPT merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. TPT mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran.

**3,12**

## TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT)

## RATA-RATA PENGELUARAN PERKAPITAPERBULAN



## ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH (APS)

APS merupakan proporsi anak sekolah pada usia jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok usia yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut



## ANGKA KESAKITAN (MORBIDITY)

Angka Kesakitan (Morbidity) menunjukkan adanya gangguan/ keluhan kesehatan yang mengakibatkan terganggunya aktivitas sehari-hari, baik dalam melakukan pekerjaan, bersekolah, mengurus rumah tangga maupun melakukan aktivitas lainnya.

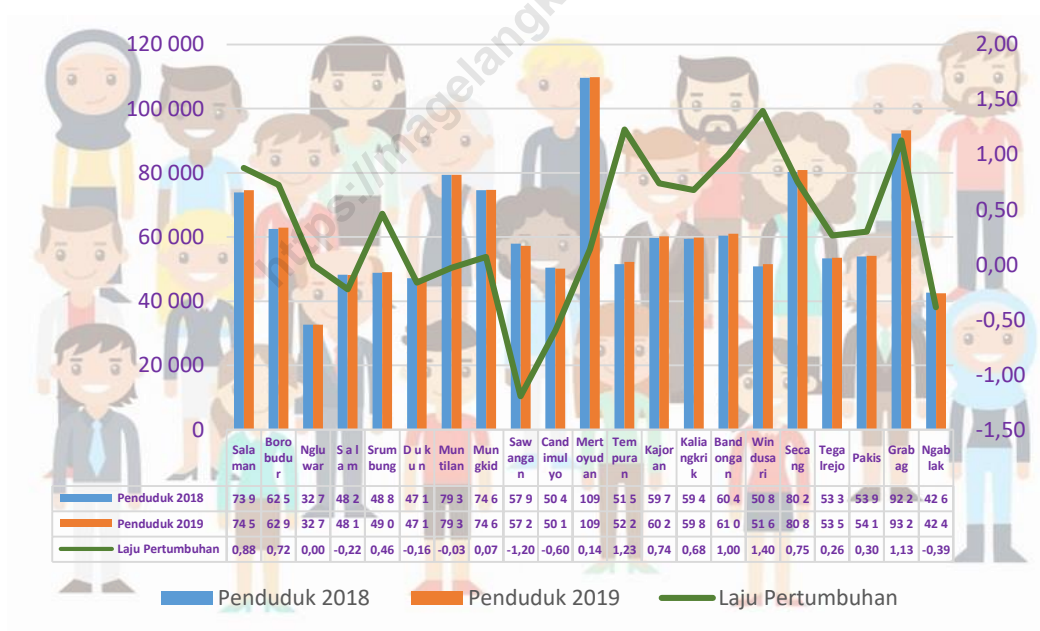


# BAB I KEPENDUDUKAN

## 1.1. Laju Pertumbuhan Penduduk, dan Rasio Jenis Kelamin

**D**ata kependudukan merupakan masalah penting dalam perencanaan pembangunan, mulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap evaluasi terhadap hasil pembangunan itu sendiri. Selain itu, data kependudukan juga dapat digunakan untuk memperkirakan bentuk dan volume kegiatan yang akan dilakukan di masa yang akan datang.

Gambar 1.1 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Magelang, 2018-2019



Sumber: BPS, Data Strategis Kabupaten Magelang 2019

Jumlah penduduk Kabupaten Magelang pada 2019 berdasarkan data registrasi dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magelang tercatat sebanyak 1 295 019 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Magelang tahun 2019 sebesar 0,38 persen.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk adalah kelahiran, kematian, penduduk masuk, dan penduduk ke luar. Laju pertumbuhan penduduk negatif menunjukkan bahwa penduduk yang keluar dan berpindah tempat tinggal maupun yang meninggal lebih banyak dibandingkan dengan kelahiran dan penduduk yang masuk. Laju pertumbuhan penduduk positif menunjukkan bahwa penduduk yang masuk ke wilayah tersebut dan penduduk yang lahir lebih besar dibandingkan dengan penduduk yang keluar dan pindah.

Kecamatan dengan laju pertumbuhan penduduk negatif tahun 2019 di Kabupaten Magelang adalah Kecamatan Salam, Dukun, Muntilan, Sawangan, Candimulyo dan Ngablak. Sedangkan kecamatan dengan laju pertumbuhan penduduk di atas angka satu adalah Kecamatan Tempuran, Bandongan, Windusari dan Grabag. Makin berkurangnya lahan pekerjaan di daerah asal, pernikahan, berkurangnya sumber daya alam, kebudayaan, maupun bencana alam menjadi faktor penyebab adanya perpindahan penduduk.

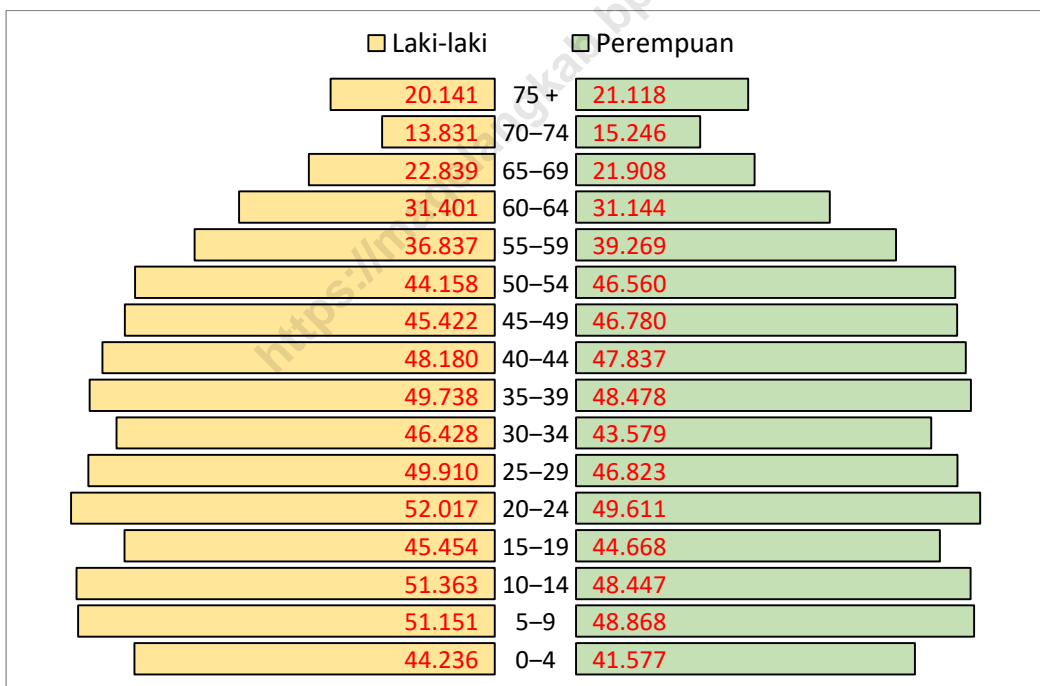
Pencapaian Kabupaten Magelang dalam hal pengendalian penduduk tersebut, tentunya layak untuk diapresiasi. Hal ini dikarenakan, jumlah penduduk yang besar harus sejalan dengan pemenuhan segala kebutuhan hidup. Jika terjadi kendala terhadap pemenuhan kebutuhan hidup, dikhawatirkan akan menimbulkan berbagai masalah yang dapat mengganggu kesejahteraan penduduk. Penyediaan pangan yang tidak mencukupi dapat menimbulkan terjadinya kelaparan dan risiko meningkatnya jumlah kematian penduduk. Sebagaimana dikatakan oleh Thomas Robert Malthus (1766-1834) dalam teori kependudukannya, beliau berpendapat bahwa penduduk bertambah menurut deret ukur, sedangkan produksi pangan bertambah menurut deret hitung.

Jika dilihat dari komposisi penduduk berdasar jenis kelamin, persentase penduduk laki-laki di Kabupaten Magelang lebih besar daripada persentase penduduk perempuan. Jumlah penduduk laki-laki pada 2019 berjumlah 653 106 jiwa atau sebesar 50,43 persen dari total jumlah penduduk, sedangkan penduduk perempuan sebanyak 641 913 jiwa atau sebesar 49,57 persen.



Piramida penduduk Kabupaten Magelang berbentuk piramida expansive atau dikenal juga dengan piramida penduduk muda karena penduduk yang berusia muda lebih banyak. Piramida expansive berbentuk seperti limas, menunjukkan bahwa angka kelahiran cukup tinggi sedangkan angka kematiannya rendah. Bentuk piramida expansive Kabupaten Magelang sebagaimana umumnya terdapat pada negara-negara berkembang, seperti; India, Malaysia, Thailand, Filipina, Indonesia. Ciri-ciri Piramida Expansive penduduk suatu wilayah/ negara sebagian besar berada pada kelompok penduduk berusia muda. Penduduk pada kelompok usia tua jumlahnya jauh lebih sedikit dari kelompok usia muda. Angka kelahiran bayi relatif tinggi sedangkan angka kematian rendah sehingga pertumbuhan penduduknya tinggi.

Gambar 1.2 Piramida Penduduk Kabupaten Magelang, 2019



Sumber: BPS, Kabupaten Magelang dalam Angka 2020

## 1.2. Persebaran dan Kepadatan Penduduk

Salah satu persoalan yang terkait dengan kependudukan adalah masalah ketimpangan distribusi penduduk. Distribusi penduduk yang tidak merata menimbulkan masalah pada kepadatan penduduk dan tekanan penduduk di suatu wilayah.

Tabel 1.1 Persentase dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Magelang Menurut Kecamatan, 2019

Kecamatan	Persentase Penduduk	Luas (km <sup>2</sup> )	Kepadatan Penduduk per km <sup>2</sup> (Jiwa/km <sup>2</sup> )
(1)	(2)	(3)	(4)
01. Salaman	5,76	68,87	1 083
02. Borobudur	4,86	54,55	1 154
03. Ngluwar	2,53	22,44	1 458
04. S a l a m	3,72	31,63	1 522
05. Srumbung	3,79	53,18	923
06. D u k u n	3,64	53,4	882
07. Muntilan	6,13	28,61	2 773
08. Mungkid	5,76	37,4	1996
09. Sawangan	4,42	72,37	792
10. Candimulyo	3,87	46,95	1 068
11. Mertoyudan	8,48	45,35	2 421
12. Tempuran	4,03	49,04	1 065
13. Kajoran	4,65	83,41	722
14. Kaliangkrik	4,62	57,34	1 043
15. Bandongan	4,72	45,79	1 334
16. Windusari	3,98	61,65	837
17. Secang	6,25	47,34	1 709
18. Tegalarjo	4,13	35,89	1 491
19. Pakis	4,18	69,56	779
20. Grabag	7,20	77,16	1 209
21. Ngablak	3,28	43,8	970
<b>Total</b>	<b>100</b>	<b>1 085,73</b>	<b>1 193</b>

Sumber: Diolah dari Kabupaten Magelang dalam Angka 2020

Kepadatan penduduk suatu wilayah merupakan perbandingan antara jumlah penduduk dengan luas wilayah. Dengan wilayah Kabupaten Magelang yang seluas 1 085,73 km<sup>2</sup> dan jumlah penduduk mencapai 1 295 019 jiwa, kepadatan penduduk Kabupaten Magelang pada 2019 adalah 1 193 jiwa/km<sup>2</sup>. Hal ini menunjukkan bahwa setiap 1 km<sup>2</sup> wilayah Kabupaten Magelang dihuni oleh rata-rata 1 193 jiwa.

Dilihat dari kepadatan penduduk per kecamatan secara empiris, penduduk akan banyak dijumpai pada daerah-daerah dengan aktivitas ekonomi tinggi, ketersediaan sarana dan prasarana sosial, transportasi yang memadai, serta kondisi sosial ekonomi yang lebih baik. Sebagaimana terlihat dalam Tabel 1.2, kecamatan dengan kepadatan penduduk tertinggi di Kabupaten Magelang pada 2019 adalah Kecamatan Muntilan, yaitu sebesar 2.773 jiwa per 1 km<sup>2</sup>. Sementara itu, kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah adalah Kecamatan Kajoran dengan kepadatan penduduk hanya sebesar 722 jiwa per 1 km<sup>2</sup>. Beberapa kecamatan lain, seperti Srumbung, Dukun, Sawangan, Windusari, Pakis dan Ngablak juga memiliki angka kepadatan penduduk di bawah 1000. Jika dicermati, beberapa kecamatan dengan angka kepadatan penduduk di bawah 1000 tersebut merupakan wilayah dengan topografi pegunungan.

Distribusi penduduk antar wilayah yang tidak merata, bisa menimbulkan beberapa permasalahan. Di satu sisi, wilayah dengan jumlah penduduk yang besar akan dihadapkan pada persoalan meningkatnya jumlah pengangguran karena tidak memadainya penyediaan lapangan pekerjaan, permasalahan kebutuhan lahan untuk pemukiman, serta tidak memadainya akses fasilitas pendidikan dan kesehatan serta masalah-masalah sosial lainnya. Di sisi lainnya, wilayah dengan jumlah penduduk yang relatif sedikit akan memunculkan persoalan optimalisasi sumber daya alam terkait dengan kekurangan tenaga kerja padahal wilayah tersebut memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah.

### **1.3. Angka Beban Ketergantungan dan Rasio Jenis Kelamin**

Salah satu dampak keberhasilan pembangunan di bidang kependudukan dapat dilihat dari perubahan komposisi penduduk menurut umur, seperti tercermin pada semakin rendahnya angka beban ketergantungan. Angka beban ketergantungan atau rasio ketergantungan (*dependency*

*ratio*) merupakan perbandingan antara jumlah penduduk umur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun ke atas (keduanya disebut dengan bukan angkatan kerja) dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun (angkatan kerja).

Tabel.1.2 Rasio Ketergantungan dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan Kabupaten Magelang, 2019

Kecamatan	Rasio Ketergantungan	Rasio Jenis Kelamin
(1)	(2)	(3)
01. Salaman	45,16	100,60
02. Borobudur	45,93	101,46
03. Ngluwar	47,50	99,36
04. Salam	46,44	99,94
05. Srumbung	47,45	100,14
06. Dukun	44,86	99,80
07. Muntilan	43,46	100,06
08. Mungkid	45,53	99,86
09. Sawangan	45,04	101,62
10. Candimulyo	45,65	102,18
11. Mertoyudan	42,23	98,50
12. Tempuran	43,50	102,99
13. Kajoran	45,72	103,08
14. Kaliangkrik	45,20	104,86
15. Bandongan	44,06	104,41
16. Windusari	45,34	106,51
17. Secang	45,26	100,63
18. Tegalrejo	44,95	102,43
19. Pakis	41,19	104,61
20. Grabag	46,58	102,97
21. Ngablak	42,54	104,71
<b>Kabupaten Magelang</b>	<b>44,81</b>	<b>101,74</b>

Sumber: Diolah dari Kabupaten Magelang dalam Angka 2020

Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara apakah tergolong negara maju atau negara yang sedang berkembang. *Dependency ratio* merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya persentase *dependency ratio* menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase *dependency ratio* yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Tahun 2020 -2030, Indonesia akan memasuki bonus demografi. Pada rentan waktu tersebut, diperkirakan penduduk usia produktif Indonesia akan mencapai 70 persen. Bonus demografi adalah suatu kondisi di mana jumlah penduduk produktif atau angkatan kerja (usia 15-64 tahun) lebih besar dibandingkan penduduk yang tidak produktif (di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun). Bonus demografi akan mejadi berkah jika angkatan kerja produktif yang mendominasi jumlah penduduk bisa terserap pada pasar kerja secara baik. Sebaliknya, bonus demografi menjadi bencana demografi jika angkatan kerja tidak terserap pasar kerja dengan baik.

Penduduk usia produktif di Kabupaten Magelang menjadi sangat potensial sebagai modal dasar yang besar untuk pembangunan. Hal tersebut sejalan dengan prediksi bahwa bonus demografi di Indonesia akan terjadi pada tahun 2030. Menyambut era bonus demografi tersebut, pemerintah Kabupaten Magelang perlu mempersiapkan diri dalam ketersediaan lapangan pekerjaan untuk penduduk usia produktif.

Berdasarkan komposisi penduduk menurut usia produktif/nonproduktif didapatkan angka beban ketergantungan penduduk Kabupaten Magelang tahun 2019 sebesar 44,81. Artinya, setiap 100 orang penduduk usia produktif (usia 15-64 tahun) harus menanggung sebanyak 45 penduduk usia tidak produktif (usia di bawah 15 tahun dan di atas 65 tahun). Rasio ketergantungan tertinggi ada di Kecamatan Ngluwar sebesar 47,50 sedangkan terendah di Kecamatan Pakis sebesar 41,19. Rasio jenis kelamin (*sex ratio*) merupakan perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dengan penduduk perempuan pada waktu tertentu. *Sex Ratio* merupakan indikator yang digunakan untuk

mengetahui komposisi menurut jenis kelamin. Angka *sex ratio* dipengaruhi oleh angka kelahiran, migrasi dan kematian berdasarkan jenis kelamin.

Data rasio jenis kelamin berguna untuk pengembangan perencanaan pembangunan yang berwawasan gender, terutama yang berkaitan dengan perimbangan pembangunan laki-laki dan perempuan secara adil, juga guna merancang pengembangan pendidikan berwawasan gender harus memperhitungkan kedua jenis kelamin dengan mengetahui berapa banyaknya laki-laki dan perempuan dalam umur tertentu. Informasi tentang rasio jenis kelamin juga dianggap penting untuk diketahui oleh para politisi, terutama untuk mengetahui keterwakilan perempuan dalam parlemen. (Pemprov Kalbar, 2014).

Apabila dilihat dari Rasio Jenis Kelamin (*Sex ratio*/ RJK), *sex ratio* Kabupaten Magelang menunjukkan angka 101,74 persen, yang artinya setiap 100 orang penduduk perempuan terdapat 102 orang penduduk laki-laki. Berdasarkan rasio jenis kelamin (*sex ratio*) per kecamatan, Kecamatan Windusari memiliki *sex ratio* tertinggi, sebesar 106,51 persen, sedangkan *sex ratio* terkecil berada di Kecamatan Mertoyudan yaitu 98,50 persen. Selain Kecamatan Mertoyudan, beberapa kecamatan lain juga memiliki penduduk perempuan lebih banyak dibanding penduduk laki-laki. Hal itu ditandai dengan besaran *sex ratio* yang kurang dari 100. Kecamatan-kecamatan tersebut adalah Ngluwar, Dukun, dan Mungkid.

Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan *sex ratio* adalah kelahiran, kematian, dan migrasi. *Sex ratio* kurang dari seratus menunjukkan bahwa penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan dengan penduduk laki-laki. Hal ini bisa disebabkan karena keluarnya penduduk laki-laki ke luar daerah untuk mencari pekerjaan, maupun berpindahnya penduduk perempuan ke dalam suatu wilayah untuk mendapatkan pekerjaan. Kecamatan Mertoyudan dengan tingkat pertumbuhan fasilitas ekonomi, menjadi salah satu faktor penyerap tenaga kerja. Hal ini memungkinkan tenaga kerja perempuan banyak masuk ke wilayah ini, untuk mencari pekerjaan, sehingga *sex ratio* untuk Kecamatan Mertoyudan kurang dari 100.

## 1.4. Wanita Menurut Usia Perkawinan Pertama

Salah satu persoalan penduduk yang dapat memicu tingginya pertambahan jumlah penduduk yaitu tingginya angka kelahiran di suatu daerah. Kelahiran (fertilitas) merupakan salah satu komponen yang mempengaruhi jumlah penduduk. Kelahiran yang tinggi bila disertai dengan kematian yang rendah akan menyebabkan terjadinya peningkatan jumlah penduduk. Tingginya angka kelahiran ini sangat berkaitan dengan usia perkawinan pertama. Umur perkawinan pertama merupakan umur pertama menikah untuk penduduk perempuan yang menandakan dimulainya masa reproduksi.

Tabel 1.3 Persentase Penduduk Wanita Umur 10 Tahun ke Atas yang Pernah Kawin dan Rata-Rata Umur Perkawinan Pertama di Kabupaten Magelang, 2013-2019

Tahun	Rata-Rata Umur Perkawinan Pertama (Tahun)		
	≤16	17-18	≥19
(1)	(2)	(3)	(4)
2013	17,94	23,94	58.12
2014	16,6	23,93	59.47
2015	4,95	19,85	75.2
2016	12,63	23,65	63.72
2017	13,11	21,97	64.92
2018	12,27	18,38	69.35
2019	15,22	20,05	64.72

Sumber: BPS, Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Tengah 2019

Terdapat beberapa sumber mengenai batasan usia minimal seorang wanita untuk melakukan perkawinan pertama. Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pada pasal 7 ayat (1), syarat menikah untuk perempuan harus sudah berusia minimal 16 tahun, sedangkan menurut Undang-Undang Perlindungan Anak usia minimal untuk menikah yaitu sudah berumur 18 tahun. Sementara itu, menurut Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) usia pernikahan pertama bagi seseorang idealnya adalah 21-25 tahun.

Berdasarkan hasil Susenas 2013-2019, persentase wanita yang melakukan perkawinan pertamanya pada usia di bawah 17 (≤16) tahun terlihat fluktuatif. Pada 2019, wanita yang

melakukan perkawinan pertamanya pada usia di bawah 17 tahun sebesar 15,22 persen, sedangkan wanita yang melakukan perkawinan pertamanya pada usia di atas 17 tahun adalah 84,77 persen. Belum cukupnya kesiapan baik dari aspek kesehatan, mental emosional, pendidikan, sosial ekonomi dan reproduksi membuat perkawinan pertama pada wanita di bawah 17 tahun sangat rentan terhadap risiko kematian dan kesehatan, selain juga memperbesar peluang jumlah penduduk yang dilahirkan. Oleh karena itu, persentase wanita yang melakukan perkawinan pertama di bawah 17 tahun perlu dikendalikan.

### **1.5. Penggunaan Alat/ Cara KB**

Secara umum, Keluarga Berencana (KB) merupakan suatu program pemerintah yang dirancang guna menyeimbangkan antara kebutuhan dan jumlah penduduk. Jika dijabarkan, program ini pada dasarnya bertujuan untuk mengatur kelahiran atau menunda kehamilan, meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak dalam rangka mewujudkan Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera (NKKBS), serta menjamin terkendalinya pertumbuhan penduduk.

Kontrasepsi didefinisikan sebagai usaha-usaha untuk mencegah kehamilan. Alat kontrasepsi yang dapat direkomendasikan kepada Ibu yang ingin menunda kehamilan dan yang menjarangkan kehamilan adalah pil, IUD/spiral, implan/susuk, suntik atau alat kontrasepsi sederhana, misalnya kondom. Sementara itu, untuk yang tidak menginginkan hamil lagi, alat kontrasepsi yang paling direkomendasikan adalah kontrasepsi mantap yaitu dengan melakukan tubektomi (steril pada wanita) atau vasektomi (steril pada pria) selain semua metode yang lain.

Kontrasepsi ideal harus memenuhi beberapa syarat, di antaranya: dapat dipercaya, tidak menimbulkan efek yg mengganggu kesehatan, daya kerja dapat diatur sesuai kebutuhan, tidak menimbulkan gangguan ketika koitus, tidak memerlukan motivasi terus menerus, mudah pelaksanaannya, murah harganya dan dapat diterima penggunaannya oleh pasangan yang bersangkutan. Dengan cakupan KB yang meningkat, diharapkan laju pertumbuhan penduduk bisa dikendalikan lebih baik lagi.

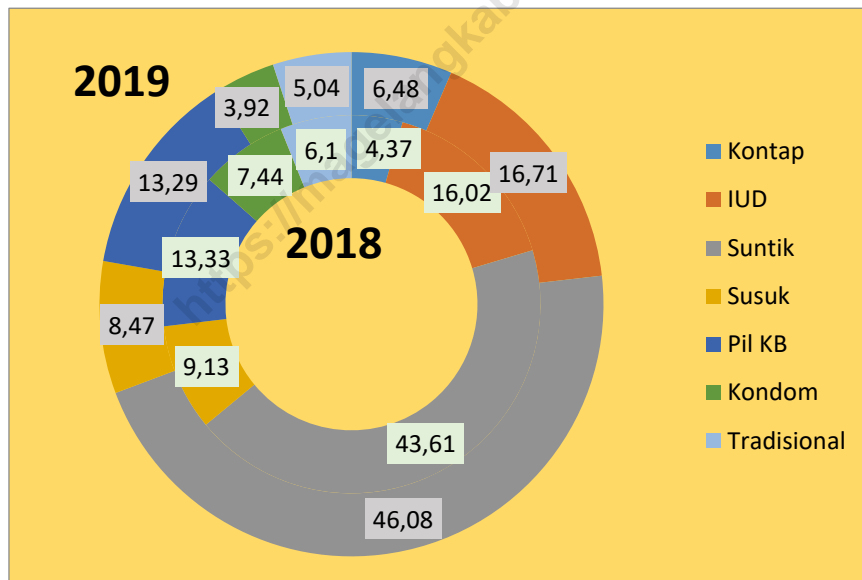
Berbagai macam alat/cara KB digunakan oleh pasangan usia subur di Kabupaten Magelang, namun yang paling banyak peminatnya selama dua tahun terakhir adalah penggunaan alat KB



suntikan dan pil yang bersifat jangka pendek (Susenas, 2018-2019). Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2019, menunjukkan bahwa persentase penggunaan kontrasepsi KB metode suntikan di Kabupaten Magelang mencapai 46,08 persen, yang diikuti oleh IUD 16,71 persen dan pil 13,29 persen.

Sejalan dengan hasil Susenas, Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magelang juga mengungkapkan, mayoritas masyarakat lebih memilih untuk menggunakan alat kontrasepsi dengan metode suntikan.

Gambar 1.4. Persentase Wanita Berumur 15-49 Tahun dan Kawin yang Sedang Menggunakan Alat/Cara Kontrasepsi di Kabupaten Magelang, 2018-2019



Sumber: BPS, Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Tengah 2019

## BAB 2 KESEHATAN DAN GIZI

**K**esehatan merupakan salah satu aspek penting dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Masyarakat yang memiliki kesehatan fisik dan mental yang baik, dapat melakukan aktivitas secara produktif dalam proses pembangunan nasional. Apabila angka kesakitan pada penduduk terutama golongan usia produktif di suatu wilayah tinggi, dikhawatirkan dapat menurunkan kualitas sumber daya manusia di wilayah tersebut.

Upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat telah dilakukan oleh pemerintah melalui program pembangunan, di antaranya meningkatkan akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan, menyediakan sumber daya kesehatan yang kompeten, mendistribusikan tenaga kesehatan secara merata ke seluruh wilayah, meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan melalui pembangunan puskesmas, rumah sakit; polindes dan posyandu, serta menyediakan obat-obatan yang terjangkau oleh masyarakat.

### 2.1. Derajat dan Status Kesehatan Penduduk

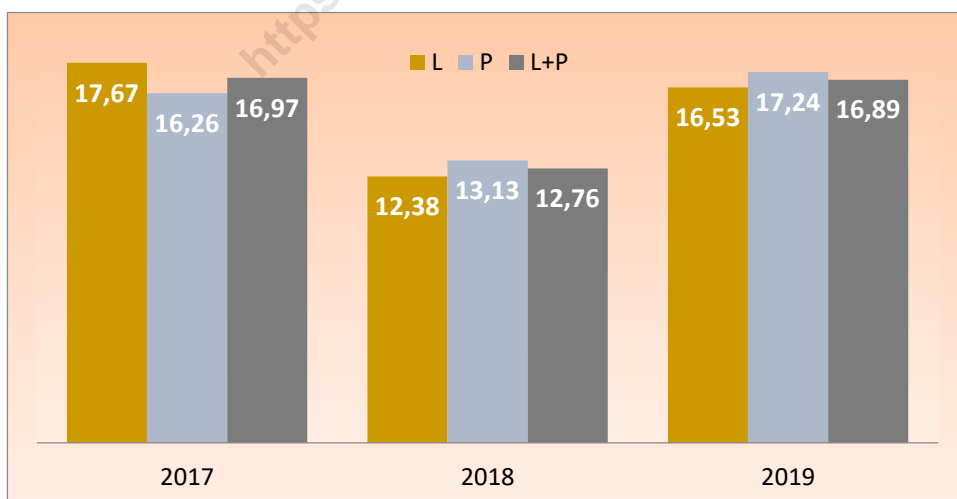
Kondisi sehat secara holistik bukan saja kondisi sehat secara fisik melainkan juga spiritual dan sosial dalam bermasyarakat. Untuk menciptakan kondisi sehat seperti ini diperlukan suatu keharmonisan dalam menjaga kesehatan tubuh. Menurut Hendrik L. Blum, seorang profesor emeritus administrasi kesehatan dan perencanaan di *University of California*, terdapat 4 faktor determinan munculnya masalah kesehatan, yaitu: faktor perilaku/ gaya hidup (*life style*), faktor lingkungan (sosial, ekonomi, politik, budaya), faktor pelayanan kesehatan (jenis cakupan dan kualitasnya) dan faktor genetik (keturunan). Keempat faktor tersebut saling berinteraksi yang mempengaruhi kesehatan perorangan dan derajat kesehatan masyarakat (Notoatmodjo, 1997).

Di antara keempat faktor tersebut, faktor keturunan merupakan faktor yang paling sulit untuk

diatasi. Oleh karena itu, yang terbaik adalah pencegahan, yang dapat dilakukan sebelum penyakit secara keturunan ini muncul. Sementara itu, tiga faktor lain masih dapat diupayakan oleh pemerintah dan masyarakat, seperti: semakin memudahkan akses pelayanan kesehatan bagi semua kelompok masyarakat, meningkatkan kesadaran untuk berperilaku hidup sehat di kalangan masyarakat luas, serta memberikan dukungan peningkatan kesehatan lingkungan.

Merujuk pada konsep yang diterapkan oleh BPS dalam Susenas, morbiditas (angka kesakitan) menunjukkan adanya gangguan/ keluhan kesehatan yang mengakibatkan terganggunya aktivitas sehari-hari, baik dalam melakukan pekerjaan, bersekolah, mengurus rumah tangga maupun melakukan aktivitas lainnya. Pada umumnya keluhan kesehatan yang mengindikasikan adanya suatu penyakit yang biasa dialami oleh penduduk adalah panas, batuk, pilek, asma/napas sesak, diare, sakit kepala berulang, sakit gigi, campak dan beberapa penyakit lain. Semakin banyak penduduk yang mengalami gangguan kesehatan berarti semakin rendah derajat kesehatan di wilayah tersebut dan menunjukkan angka kesakitan yang tinggi di wilayah tersebut (penduduknya banyak yang mengalami sakit).

Gambar 2.1 Angka Kesakitan dalam Satu Bulan Terakhir di Kabupaten Magelang 2017-2019

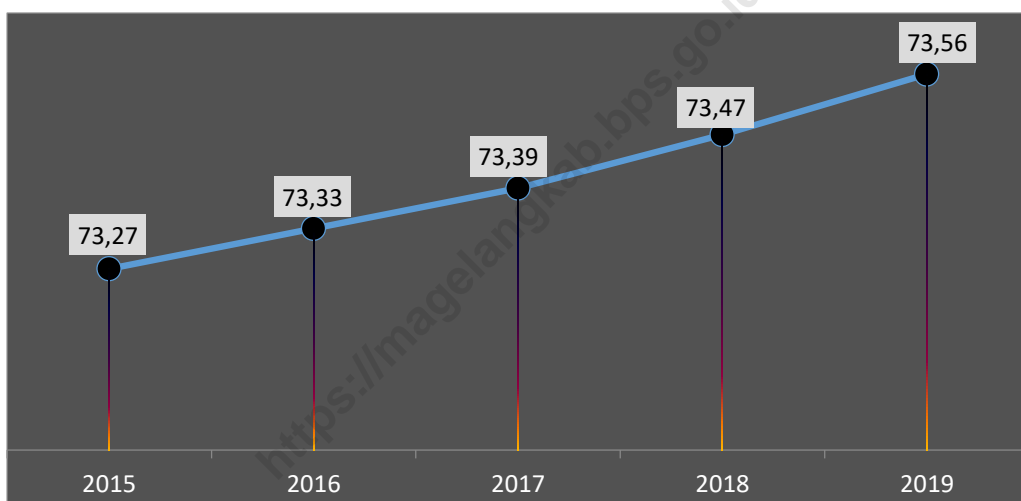


Sumber: BPS, Profil Kesehatan Provinsi Jawa Tengah 2019

Berdasarkan jenis kelamin, hasil Susenas 2019 menunjukkan angka kesakitan penduduk perempuan di Kabupaten Magelang lebih tinggi dibandingkan dengan angka kesakitan penduduk laki-laki sebesar 0,71 poin. Hal serupa juga terjadi di tahun 2018. Sedangkan untuk tahun 2017, angka kesakitan perempuan lebih rendah dibandingkan dengan angka kesakitan laki-laki.

Semakin membaiknya derajat kesehatan di Kabupaten Magelang diikuti pula dengan peningkatan Angka Harapan Hidup. Tercatat, selama lima tahun terakhir Angka Harapan Hidup meningkat 0,22 poin, dari 73,25 pada 2015 menjadi 73,47 tahun pada 2019.

Gambar 2.2. Angka Harapan Hidup Kabupaten Magelang, 2015-2019 (Tahun)



Sumber: BPS Kab. Magelang

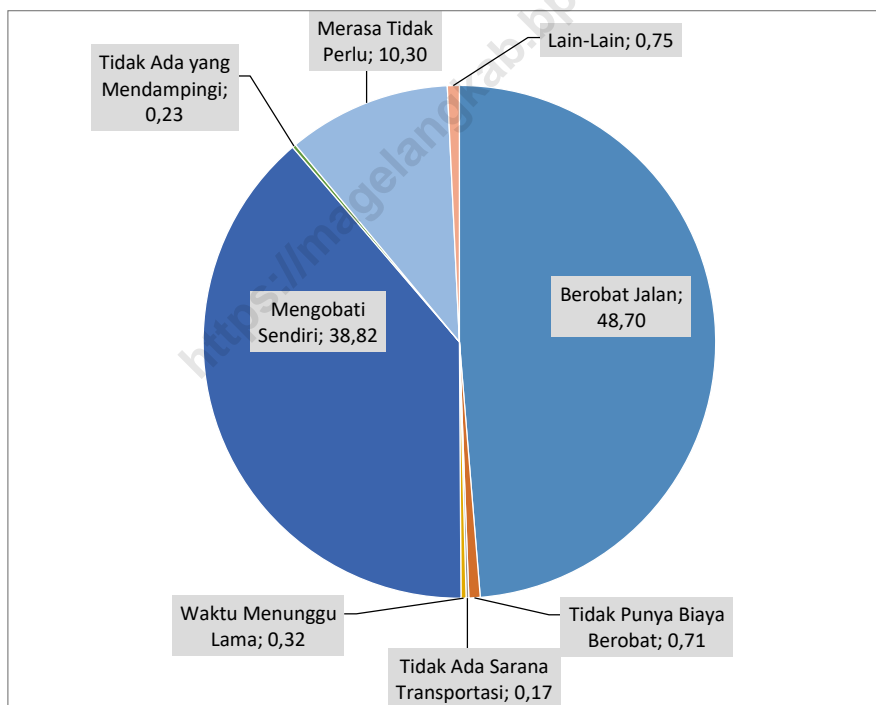
## 2.2. Pemanfaatan Fasilitas Tenaga Kesehatan

Akses penduduk dalam memanfaatkan tenaga kesehatan dapat dilihat dari ketersediaan/kemudahan mencapai fasilitas/tempat dan tenaga kesehatan sebagai rujukan penduduk, jika mengalami keluhan sakit hingga harus pergi berobat. Dari informasi tersebut dapat teridentifikasi berbagai masalah yang dihadapi penduduk dalam mengakses dan memanfaatkan fasilitas dan pelayanan kesehatan. Beberapa faktor yang menjadi pertimbangan penduduk dalam mengakses dan memanfaatkan fasilitas dan pelayanan kesehatan tersebut adalah jarak tempat tinggal dengan

letak sarana pelayanan kesehatan, kualitas pelayanan, sosial-ekonomi penduduk (kemampuan penduduk untuk membiayai pengobatannya) serta jenis pelayanan kesehatan.

Salah satu indikator pemanfaatan fasilitas dan pelayanan kesehatan adalah banyaknya penduduk yang mengalami keluhan kesehatan dan berobat ke fasilitas kesehatan. Berdasarkan data Susenas 2019, terdapat 48,70 persen penduduk Kabupaten Magelang yang mengalami keluhan kesehatan dan berobat jalan, sedangkan sisanya, yaitu 41,30 persen penduduk memutuskan untuk tidak berobat jalan. Cara pengobatan yang dilakukan masyarakat selain berobat jalan tersebut, misalnya dengan mengobati sendiri atau merasa tidak perlu diobati.

Gambar 2.3 Penduduk yang Mengalami Keluhan Kesehatan di Kabupaten Magelang, 2019



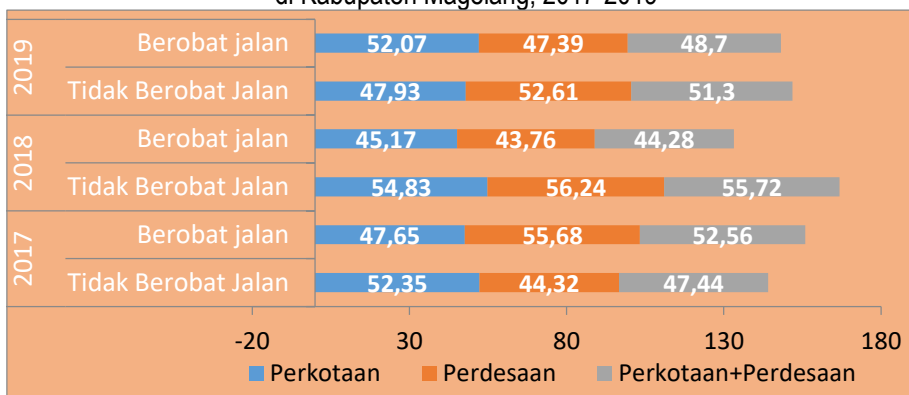
Sumber: BPS, Profil Kesehatan Provinsi Jawa Tengah 2019

Penduduk yang mengalami keluhan kesehatan di Kabupaten Magelang, sebanyak 44,28 persen berobat jalan. Berobat jalan merupakan kegiatan atau upaya anggota rumah tangga yang mempunyai keluhan kesehatan untuk memeriksakan diri dan mendapatkan pengobatan dengan mendatangi tempat-tempat pelayanan kesehatan modern atau tradisional tanpa menginap,

termasuk mendatangkan petugas kesehatan ke rumah anggota ruta. Hal ini menunjukkan sudah ada kesadaran masyarakat untuk berobat. Sebanyak 38,82 persen penduduk yang mengalami keluhan kesehatan mengobati sendiri keluhannya. Mengobati sendiri yang dimaksud adalah upaya anggota ruta yang melakukan pengobatan dengan menentukan jenis obat sendiri (tanpa saran/resep dari tenaga kesehatan/batra). Misalnya minum obat yang dibeli dari warung atau apotek tanpa resep dokter, minum jamu, kerokan, kompres, kop, dan sebagainya agar sembuh atau lebih ringan keluhan kesehatannya. Sementara sisanya tidak melakukan berobat jalan dikarenakan merasa tidak perlu, tidak mempunyai biaya, tidak ada sarana transportasi, waktu menunggu lama, maupun lainnya.

Jika dilihat berdasarkan daerah tempat tinggal, penduduk perdesaan yang berobat jalan lebih rendah dibandingkan penduduk perkotaan, selisih 1,49 poin. Data Susenas 2019 menunjukkan, terdapat 45,17 persen penduduk perkotaan yang berobat jalan, sedangkan di daerah perdesaan mencapai 43,76 persen. Berbanding terbalik dengan data susenas tahun 2018 yang menunjukkan bahwa penduduk perdesaan lebih banyak yang berobat jalan dibandingkan dengan penduduk perkotaan. Adanya perbedaan tersebut, perlu diketahui alasan apa saja yang menjadi penyebab masyarakat tidak melakukan berobat jalan, sehingga dapat diidentifikasi berbagai masalah yang dihadapi penduduk dalam mengakses dan memanfaatkan fasilitas dan pelayanan kesehatan.

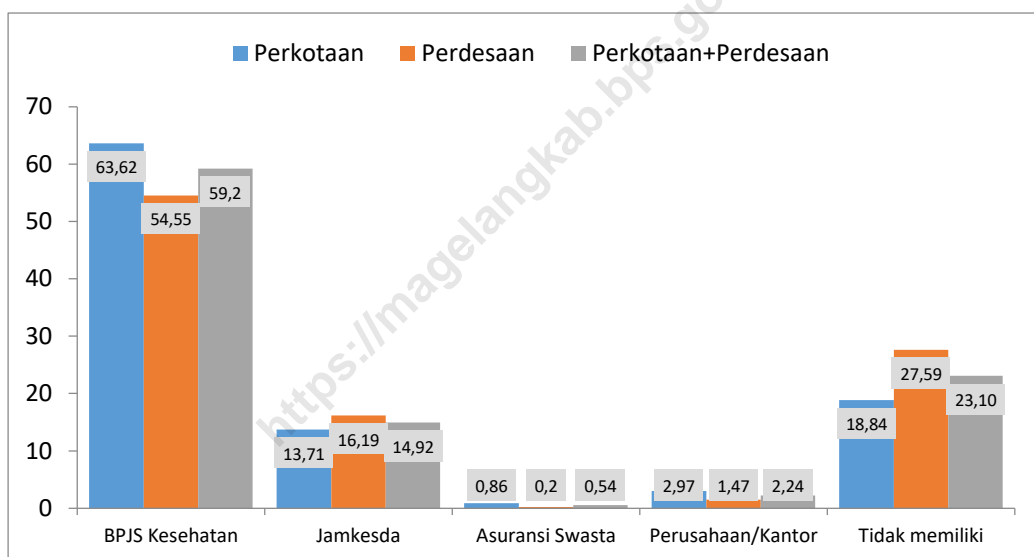
Gambar 2.4 Persentase Penduduk yang Mengalami Keluhan Kesehatan dalam Sebulan Terakhir yang Berobat Jalan dan Tidak Berobat Jalan menurut Daerah Tempat Tinggal di Kabupaten Magelang, 2017-2019



Sumber: BPS, Profil Kesehatan Provinsi Jawa Tengah 2019

Penjaminan kesehatan masyarakat melalui BPJS per Januari 2015, pada dasarnya diharapkan mampu membuka akses dan peluang yang lebih besar kepada masyarakat secara umum, untuk mendapatkan haknya guna memperoleh pelayanan kesehatan gratis, dengan melakukan pembayaran premi yang terjangkau. Di sisi lain, Rumah Sakit sebagai tempat pelayanan kesehatan dengan fasilitas kesehatan yang lengkap dan tenaga ahli/spesialis di bidangnya seringkali memberikan stigma bahwa berobat itu mahal, walaupun beberapa biaya pengobatan sudah dicukupi oleh BPJS.

Gambar 2.5 Persentase Penduduk yang Memiliki Jaminan Kesehatan menurut Daerah Tempat Tinggal di Kabupaten Magelang, 2019



Sumber: BPS, Profil Kesehatan Provinsi Jawa Tengah 2019

Sebagian besar penduduk Kabupaten Magelang sudah memiliki jaminan kesehatan. Penduduk yang tidak memiliki jaminan kesehatan sebesar 23,1 persen. Jaminan kesehatan ini baik berupa BPJS, Jamkesda, asuransi swasta maupun jaminan dari perusahaan/kantor.

Bila diamati menurut fasilitas kesehatan, sebagian besar penduduk di Kabupaten Magelang lebih memilih tempat praktik dokter/bidan daripada fasilitas kesehatan yang lain sebagai tempat berobat jalan. Hal ini terlihat dari capaiannya yang sebesar 45,43 persen tahun 2019, 40,82 persen tahun

2018, dan 45,01 persen tahun 2017. Kondisi tersebut tidak hanya terjadi di daerah perkotaan akan tetapi juga di daerah perdesaan. Alasan dipilihnya fasilitas ini sebagai tempat berobat jalan adalah karena lebih banyak tersebar di seluruh wilayah dan prosedurnya lebih mudah dibandingkan berobat jalan di rumah sakit. Dari data Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang, terdapat 589 dokter dan bidan yang tersebar di seluruh Kecamatan yang terdapat di Kabupaten Magelang.

Puskesmas menjadi pilihan kedua tempat berobat penduduk Kabupaten Magelang setelah praktik dokter/bidan. Tahun 2017 – 2019, baik penduduk perkotaan maupun perdesaan menjadikan Puskesmas sebagai sarana berobat setelah praktik dokter/bidan. Puskesmas terdapat di seluruh kecamatan dengan fasilitas yang lebih lengkap dan keberadaannya terjangkau oleh seluruh penduduk. Dari data Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang, terdapat 29 puskesmas yang tersebar di 21 kecamatan. Ada 8 kecamatan dengan 2 puskesmas, yaitu Salaman, Muntilan, Mungkid, Sawangan, Mertoyudan, Kajoran, Secang dan Grabag.

Tabel 2.1 Persentase Penduduk yang Berobat Jalan Menurut Tempat Berobat di Kabupaten Magelang, 2017-2019

Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Perkotaan			Perdesaan			Perkotaan+Perdesaan		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
RS Pemerintah	17,45	13,60	10,24	11,63	12,79	7,39	13,68	13,10	7,76
RS Swasta	2,74	7,91	12,38	2,42	3,16	2,50	2,53	4,95	3,75
Praktik Dokter/Bidan	44,79	41,49	38,02	45,13	40,42	50,35	45,01	40,82	45,43
Klinik/Praktik Dokter Bersama	4,63	15,26	7,27	10,74	8,68	11,72	8,59	11,15	12,64
Puskesmas/Pustu	28,22	23,49	34,09	27,40	29,91	28,70	27,69	27,50	31,15
UKBM (Poskesdes, Polindes, Posyandu, Balai Pengobatan)	2,74	0,31	2,05	5,23	4,25	4,27	4,36	2,76	3,00
Praktik Tradisional/Alternatif	3,74	2,53	1,67	2,81	5,40	1,44	3,14	4,32	1,90
Lainnya	0,66	0,00	0,00	0,00	0,48	1,56	0,23	0,36	1,52

Sumber: BPS, Profil Kesehatan Provinsi Jawa Tengah 2019

Rumah sakit pemerintah menjadi pilihan ketiga terbesar penduduk Kabupaten Magelang untuk berobat jalan. Ini terjadi pada penduduk perkotaan maupun perdesaan. Selama tahun 2017-2019, persentase penduduk perkotaan yang berobat di rumah sakit pemerintah lebih banyak



dibandingkan dengan penduduk perdesaan. Jangkauan penduduk perkotaan untuk mengakses rumah sakit pemerintah lebih mudah dibandingkan dengan penduduk perdesaan. Selain Rumah Sakit Pemerintah yang terdapat di Kabupaten Magelang, penduduk Kabupaten Magelang juga memanfaatkan fasilitas Rumah Sakit Pemerintah yang berada di luar Kabupaten Magelang, terutama pada penduduk yang tinggal di perbatasan Kabupaten dan Kota Magelang. Di Kabupaten Magelang sendiri baru terdapat satu rumah sakit pemerintah yang berada di Kecamatan Muntilan.

Fenomena yang cukup menarik adalah semakin meningkatnya minat masyarakat untuk melakukan pengobatan tradisional/alternatif selama tiga tahun terakhir. Kondisi ini tentu tak lepas dari maraknya pengobatan herbal yang semakin banyak dijumpai di masyarakat. Selain itu, kesadaran masyarakat untuk kembali ke alam termasuk dalam menyembuhkan penyakit, turut mendorong meningkatnya pengobatan tradisional di Kabupaten Magelang.

## BAB 3 PENDIDIKAN

Pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia. Oleh sebab itu, setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya. Hak memperoleh pendidikan bagi setiap warga negara tidak memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama dan gender. Berdasarkan hal itu pula maka dalam usaha pemenuhannya harus direncanakan dan dijalankan dengan sebaik mungkin. Pemenuhan atas hak untuk mendapatkan pendidikan dasar yang layak dan bermutu merupakan ukuran keadilan dan pemerataan atas hasil pembangunan. Hal tersebut juga menjadi investasi sumber daya manusia yang diperlukan untuk mendukung keberlangsungan pembangunan bangsa.

Pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan diharapkan mampu menjadikan warga negara Indonesia memiliki kecakapan hidup sehingga mendorong tegaknya pembangunan manusia seutuhnya serta masyarakat madani dan modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-undang tersebut juga menjelaskan bagaimana posisi pemerintah dalam dunia pendidikan. Pemerintah berkewajiban “mencerdaskan kehidupan bangsa”, termasuk segala hal yang terkait dengan pendidikan, baik dari sisi penyelenggaraan, sarana, maupun ketersediaan pengajar.

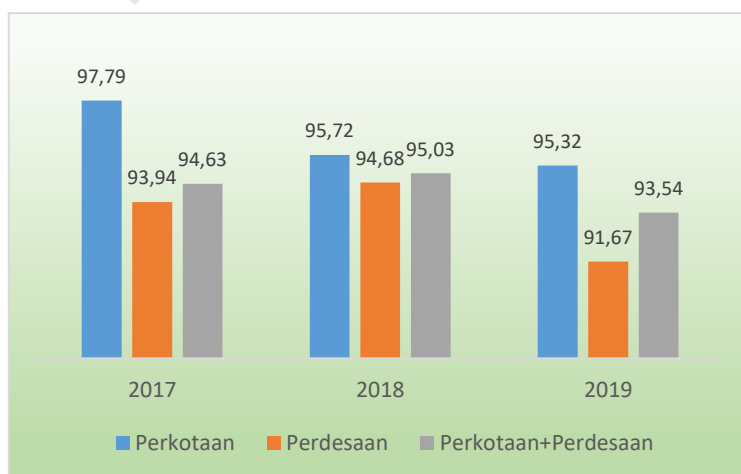
Mengacu pada pembahasan di atas, hal-hal yang menyangkut dunia pendidikan akan dibahas dalam bab ini. Beberapa indikator yang akan disajikan di dalam publikasi ini, di antaranya Angka Melek Huruf, Tingkat Pendidikan, Rata-rata Lama Sekolah, Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Murni (APM), serta Rasio Murid Guru dan Rasio Guru Sekolah. Indikator-indikator tersebut diolah dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional yang dilakukan BPS dan registrasi yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Nasional.

### 3.1. Angka Melek Huruf (AMH)

Seseorang dikatakan melek huruf apabila orang tersebut dapat menggunakan kemampuan baca dan tulis dengan huruf latin atau huruf lainnya dalam kegiatannya. Dengan kemampuan dan kecakapan tersebut memungkinkan untuk melanjutkan pemanfaatan kecakapan membaca, menulis dan berhitung untuk pengembangan diri dan masyarakat. Melek huruf sangat berkaitan erat dengan buta huruf. Semakin meningkatnya angka melek huruf menunjukkan semakin menurunnya angka buta huruf. Baik angka melek huruf maupun angka buta huruf dapat digunakan untuk melihat pencapaian keberhasilan program-program pemberantasan buta huruf.

Selain itu, angka melek huruf merupakan tolak ukur penting dalam mempertimbangkan kemampuan sumber daya manusia di suatu daerah. Hal ini didasarkan pada pemikiran yang berdalih bahwa melatih orang yang mampu baca-tulis jauh lebih mudah daripada melatih orang yang buta aksara, dan umumnya orang-orang yang mampu baca-tulis memiliki status sosial ekonomi, kesehatan, dan prospek meraih peluang kerja yang lebih baik. Kemampuan baca dan tulis juga berarti peningkatan peluang kerja dan akses yang lebih luas pada pendidikan yang lebih tinggi.

Gambar 3.1 Perkembangan Angka Melek Huruf Penduduk 15 Tahun ke Atas di Kabupaten Magelang, 2017-2019 (%)



Sumber: BPS, Statistik Pendidikan Provinsi Jawa Tengah 2019

Selama kurun waktu 2017-2019, perkembangan angka melek huruf untuk penduduk berusia 15 tahun ke atas di Kabupaten Magelang, secara umum mengalami penurunan 1,49 poin menjadi 93,54 persen dari tahun 2019. Kondisi keaksaraan di Kabupaten Magelang tahun 2018, secara rinci ditunjukkan pada Tabel 3.1. Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa di Kabupaten Magelang, proporsi angka melek huruf penduduk laki-laki berusia 15 tahun ke atas ternyata jauh lebih tinggi dibandingkan penduduk perempuan. Angka melek huruf penduduk laki-laki 15 tahun ke atas adalah 96,82 persen, sedangkan perempuan 92,51 persen.

Kendati angka melek huruf penduduk perempuan berusia 15-24 tahun hampir mencapai 100 persen, namun rendahnya angka melek huruf penduduk perempuan yang berusia 15 tahun ke atas tersebut lebih dipengaruhi oleh rendahnya angka melek huruf penduduk perempuan di kelompok umur 45 tahun ke atas, yang hanya 79,55 persen. Kondisi yang sama juga terjadi pada penduduk laki-laki. Angka melek huruf laki-laki pada kelompok umur 45 tahun ke atas juga paling rendah di antara kelompok umur yang lain, yaitu 91,45 persen.

Tabel 3.1 Angka Melek Huruf Menurut Kelompok Umur, Jenis Kelamin, dan Daerah Tempat Tinggal di Kabupaten Magelang, 2019

Tipe Daerah/ Jenis Kelamin	Kelompok Umur			
	15 Tahun ke Atas	15-24 Tahun	25-44 Tahun	45 Tahun ke Atas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>Perkotaan</b>				
Laki-laki	97,36	99,94	99,73	93,76
Perempuan	93,28	99,96	99,68	84,53
Laki-laki+Perempuan	95,32	99,95	99,71	89,02
<b>Perdesaan</b>				
Laki-laki	95,11	99,89	99,51	89,07
Perempuan	88,49	99,90	99,59	74,73
Laki-laki+Perempuan	91,67	99,89	99,55	81,47
<b>Perkotaan+Perdesaan</b>				
Laki-laki	96,29	99,92	99,63	91,45
Perempuan	90,90	99,93	99,64	79,55
Laki-laki+Perempuan	93,54	99,92	99,63	85,24

Sumber: BPS, Statistik Pendidikan Provinsi Jawa Tengah 2019

Jika dibandingkan antardaerah tempat tinggal, secara umum angka melek huruf di daerah perkotaan relatif lebih tinggi daripada daerah perdesaan, untuk semua kelompok umur. Terlihat pada Tabel 3.1, sebanyak 95,32 persen penduduk berusia 15 tahun ke atas di daerah perkotaan telah melek huruf, sedangkan di daerah perdesaan hanya sebesar 91,67 persen.

Sementara itu, untuk penduduk berusia 45 tahun ke atas, selisih AMH cenderung tinggi, terpaut 6,30 poin. AMH penduduk berusia 45 tahun ke atas di daerah perkotaan adalah 89,02 persen sedangkan di daerah perdesaan 81,47 persen. Hal ini menunjukkan bahwa proporsi penduduk yang buta huruf di daerah perdesaan lebih tinggi dibandingkan perkotaan.

### 3.1. Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah merupakan indikator yang dapat digunakan untuk melihat kualitas penduduk dalam hal mengenyam pendidikan formal. Rata-rata lama sekolah itu sendiri mempunyai pengertian jumlah tahun belajar yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Indikator rata-

*Rata-rata lama sekolah =  
Tahun Konversi + (Kelas  
Tertinggi yang Pernah diduduki  
- Tahun Konversi Pendidikan  
yang ditamatkan :  
SD = 6 tahun;  
SMP = 9 tahun;  
SMA = 12 tahun;  
D1 = 13 tahun;  
D2 = 14 tahun;  
D3 = 15 tahun;  
D4/S1 = 16 tahun  
S2 = 18 tahun;  
S3 = 21 tahun.*

rata lama sekolah sangat penting karena digunakan sebagai salah satu komponen untuk menghitung Indeks Pembangunan Manusia (IPM) khususnya di sektor pendidikan. Rata-rata lama sekolah yang digunakan dalam penghitungan IPM diukur dari penduduk berusia 25 tahun ke atas, karena pada usia tersebut proses belajar pada pendidikan formal telah berakhir.

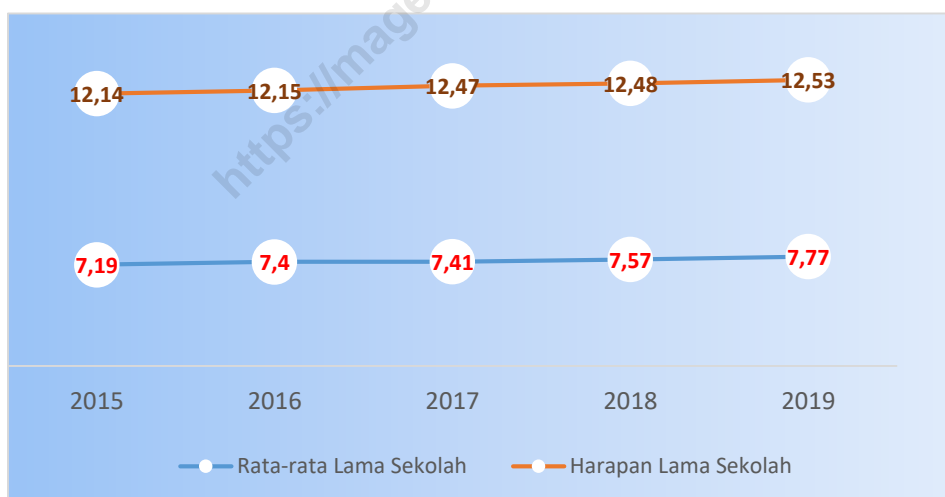
Perhitungan lama sekolah dilakukan tanpa memperhatikan apakah seseorang menamatkan sekolah lebih cepat atau lebih lama dari waktu yang telah ditetapkan. Indikator rata-rata lama sekolah menunjukkan rata jumlah tahun efektif untuk bersekolah, yang dicapai oleh penduduk. Jumlah tahun efektif adalah jumlah tahun standar yang harus dijalani oleh seseorang untuk menamatkan suatu jenjang pendidikan, misalnya tamat SD adalah 6 tahun, tamat SMP adalah 9 tahun dan seterusnya.

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang

diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

Sekolah merupakan hal terpenting dalam pembangunan manusia. Sudah semestinya di era revolusi industri 4.0 ini manusia dibekali oleh ilmu pengetahuan yang mumpuni. Zaman akan terus berubah dan perkembangan teknologi akan terus berkembang. Seseorang yang tidak bisa bertahan dengan arus kemajuan teknologi yang pesat perlahan-lahan akan tergerus oleh kemajuan zaman. Karenanya, pendidikan menjadi hal yang penting bagi manusia.

Gambar 3.2 Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah (tahun) di Kabupaten Magelang, 2015-2019



Sumber: BPS, Kabupaten Magelang dalam Angka 2019

Pada kurun waktu 2015 hingga 2019, angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Magelang meningkat sebesar 0,39 poin, menjadi 12,53 tahun. Meningkatnya Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Magelang memberi sinyal positif, bahwa kesempatan penduduk untuk bersekolah menjadi semakin tinggi. Di tahun 2019, Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Magelang telah

mencapai 12,53, yang artinya anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan mereka hingga lulus SMA atau D1.

Sejalan dengan pencapaian angka Harapan Lama Sekolah, pertumbuhan positif juga dicapai oleh angka Rata-rata Lama Sekolah. Dengan rata-rata lama sekolah di Kabupaten Magelang sebesar 7,77 tahun pada 2019, dapat disimpulkan bahwa secara rata-rata penduduk Kabupaten Magelang usia 25 tahun ke atas hampir mengenyam pendidikan hingga kelas VIII atau setara dengan SMP kelas II. Hal ini bisa diharapkan sebagai modal penting dalam membangun kualitas manusia di Kabupaten Magelang yang lebih baik.

### 3.2. Tingkat Pendidikan

Kualitas sumber daya manusia dapat juga dilihat dari keahlian atau keterampilan serta ilmu pengetahuan yang dimilikinya yang dapat digambarkan dari tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Seseorang yang menamatkan pendidikannya hingga jenjang pendidikan tinggi, cenderung mempunyai pengetahuan yang luas serta keterampilan atau keahlian yang tinggi. Dengan semakin meningkatnya keterampilan atau keahlian, akan semakin mudah mendapatkan kesempatan untuk bekerja. Indikator tingkat pendidikan yang ditamatkan juga dapat digunakan untuk mengetahui keberhasilan program wajib belajar 9 tahun yang dicanangkan pemerintah.

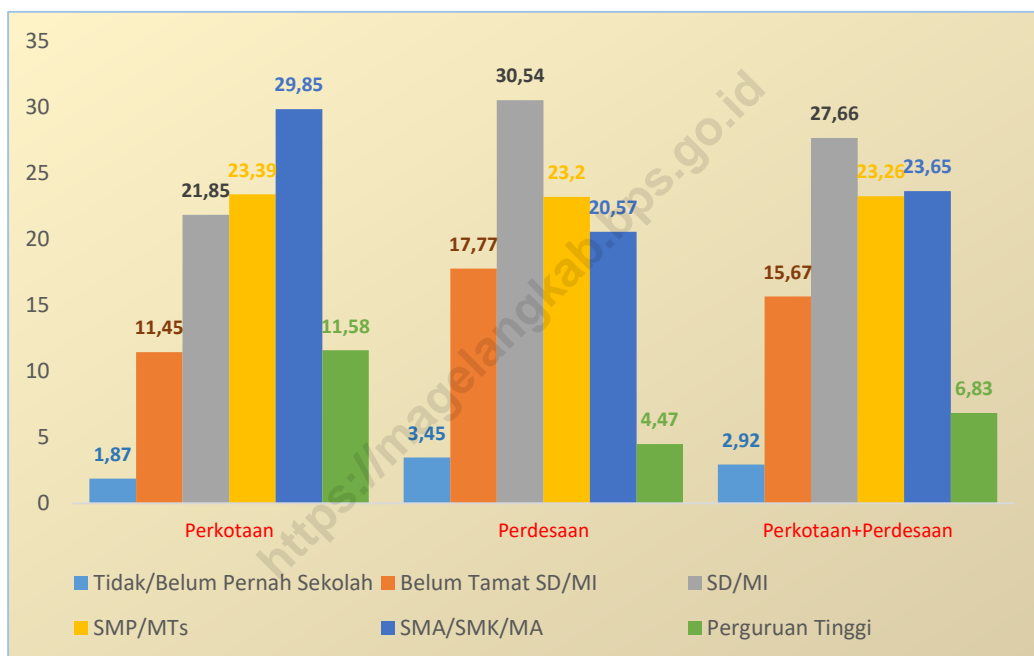
Tabel 3.2 Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas menurut Tipe Daerah dan Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kabupaten Magelang, 2017-2019 (%)

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Perkotaan			Perdesaan			Perkotaan+Perdesaan		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Tidak/Belum Pernah Sekolah	3,94	2,38	1,87	6,13	3,56	3,45	5,47	3,17	2,92
Belum Tamat SD/MI	11,79	14,05	11,45	16,20	19,96	17,77	14,86	18,02	15,67
SD/ sederajat	27,67	23,63	21,85	40,10	33,41	30,54	36,32	30,20	27,66
SMP/ sederajat	22,15	20,56	23,39	20,72	21,65	23,20	21,16	21,29	23,26
SMA/ sederajat	26,35	29,06	29,85	13,44	17,74	20,57	17,37	21,46	23,65
Perguruan Tinggi	8,10	10,32	11,58	3,40	3,68	4,47	4,83	5,86	6,83

Sumber: BPS, Statistik Pendidikan Provinsi Jawa Tengah 2019

Tabel 3.2 menggambarkan komposisi jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan dan jenis kelamin berdasarkan hasil Susenas. Dari tabel tersebut, dapat dilihat bahwa dari tahun ke tahun, penduduk berumur lebih dari 15 tahun, yang hanya mengenyam pendidikan SD semakin menurun. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi semakin besar.

Gambar 3.3 Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas menurut Tipe Daerah dan Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kabupaten Magelang, 2019



Sumber: BPS, Statistik Pendidikan Provinsi Jawa Tengah 2019

Tahun 2019, struktur persentase penduduk usia 15 tahun ke atas berbeda antara perdesaan dan perkotaan. Pendidikan tertinggi yang ditamatkan sebagian besar penduduk perkotaan berusia 15 tahun ke atas adalah SMA/SMK/MA (29,85%), sedangkan untuk penduduk perdesaan berusia 15 tahun ke atas yang paling banyak ditamatkan adalah SD/MI (30,54%). Untuk daerah perkotaan, pendidikan tertinggi kedua adalah SMP/MTs (23,39%), disusul oleh SD/MI (21,85%), Perguruan Tinggi (11,58%), belum tamat SD/MI (11,45%), dan terakhir tidak/belum pernah sekolah (1,87%). Untuk daerah perdesaan, pendidikan tertinggi kedua adalah SMA/SMK/MA (23,65%), SMP/MTS (23,26%), disusul oleh belum tamat SD/MI (15,67%), Perguruan Tinggi (6,83%), dan terakhir tidak/belum pernah sekolah (2,92%).



Faktor geografis daerah perdesaan yang membuat jarak tempuh rumah ke sekolah menjadi salah satu penyebab rendahnya tingkat pendidikan di daerah perdesaan. Selain itu faktor pribadi yang menganggap bahwa dengan sekolah belum tentu mendapatkan pekerjaan yang baik dan masih menganggap dengan bersekolah hanya membuang- buang waktu dan biaya. Hal ini menyebabkan kendala untuk tidak bersekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Ijazah pendidikan yang lebih tinggi kadang- kadang juga tidak dianggap penting untuk kelangsungan masa depannya (Hafif Hasanah, 2015).

### 3.3. Tingkat Partisipasi Sekolah (APS dan APM)

Tingkat partisipasi sekolah merupakan salah satu indikator yang dapat mengukur partisipasi masyarakat dalam mengikuti pendidikan dari berbagai jenjang pendidikan dan kelompok umur.

$$\text{APS 7-12 tahun} = \frac{\text{Jml pdck yg masih sekolah usia 7-12 tahun}}{\text{Jumlah penduduk usia 7-12 tahun}} \times 100$$

Tingkat partisipasi sekolah yang dapat diukur di antaranya yaitu Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Catatan: kelompok usia sekolah (7-12, 13-15 tahun, 16-18 dan 19-24 tahun)

dan Angka Partisipasi Murni (APM). APS menjadi indikator ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APS merupakan proporsi anak sekolah pada usia jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok usia yang sesuai dengan jejang pendidikan tersebut, sedangkan Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan proporsi penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang masih bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan kelompok usianya terhadap jumlah penduduk pada kelompok usia sekolah tersebut.

$$\text{APM SD/MI} = \frac{\text{Jumlah murid SD/MI usia 7-12 tahun}}{\text{Jumlah penduduk usia 7-12 tahun}} \times 100$$

Catatan:

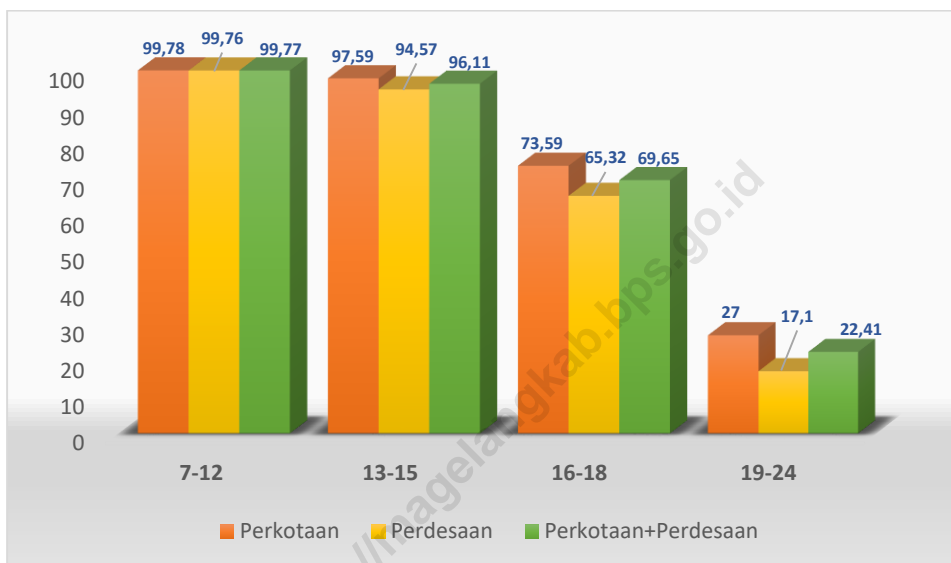
Jenjang SD/MI usia 7-12 tahun, SMP/MTs: usia 13-15 tahun, SMA/MA : usia 16 -18 tahun, dan Perguruan tinggi: usia 19-24 tahun

Bila seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu, maka APM akan mencapai 100 persen. Pemerintah berharap agar kedua indikator, APS dan

APM, selalu meningkat setiap tahunnya pada setiap jenjang pendidikan. Hal itu sebagai indikator

yang menunjukkan bahwa semakin banyak masyarakat memperoleh layanan pendidikan dasar dan menengah yang bermutu dan berkesetaraan.

Gambar 3.4 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Berdasarkan Tipe Daerah dan Kelompok Umur di Kabupaten Magelang, 2019



Sumber: BPS, Statistik Pendidikan Provinsi Jawa Tengah 2019

Berdasarkan data Susenas 2019, secara umum, APS pada kelompok umur 7-12 tahun dan 13-15 tahun relatif tinggi. Sebanyak 99,77 persen penduduk berumur 7-12 tahun di Kabupaten Magelang bersekolah. Penduduk perkotaan umur 7-12 tahun yang bersekolah sebanyak 99,78 persen. Untuk umur yang sama di perdesaan bersekolah sebanyak 99,76 persen. Selain umur 7-12 tahun, APS perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan APS perdesaan. Ini menunjukkan kesadaran penduduk perkotaan untuk sekolah lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk perdesaan.

Untuk umur 13-15 tahun, APS penduduk perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan APS penduduk perdesaan. Sebanyak 96,11 persen penduduk umur 13-15 tahun di Kabupaten Magelang bersekolah, 97,59 persen di perkotaan dan 94,57 persen di perdesaan. Untuk umur 16-18 tahun, sebanyak 69,65 persen penduduk bersekolah, 73,59 persen ada di daerah perkotaan dan 65,32 persen ada di perdesaan. Untuk umur 19-24 tahun, APS penduduk perkotaan lebih

tinggi dibandingkan dengan APS penduduk perdesaan. Sebanyak 22,41 persen penduduk Kabupaten Magelang umur 19-24 bersekolah, 27 persen ada di daerah perkotaan dan 17,1 persen ada di daerah perdesaan.

Tabel 3.3 APS menurut Usia Sekolah, Jenis Kelamin, dan Daerah Tempat Tinggal di Kabupaten Magelang, 2017-2019

Kelompok Umur	Jenis Kelamin	Perkotaan			Perdesaan			Perkotaan+Perdesaan		
		2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
7-12	Laki-laki	91,48	100,00	100,00	98,89	98,47	99,40	96,88	98,97	99,60
	Perempuan	100,00	96,27	100,00	99,33	100,00	100,00	99,56	98,90	100,00
	Laki-laki+Perempuan	96,09	98,29	100,00	99,09	99,22	99,72	98,18	98,94	99,81
13-15	Laki-laki	96,24	97,63	100,00	96,30	96,36	100,00	96,28	96,61	100,00
	Perempuan	96,52	98,73	100,00	94,44	95,25	89,65	94,96	96,26	93,32
	Laki-laki+Perempuan	96,38	98,24	100,00	95,37	95,88	95,05	95,65	96,45	96,78
16-18	Laki-laki	77,25	96,56	92,83	65,26	60,14	57,39	68,44	72,39	68,96
	Perempuan	79,98	65,17	57,73	60,01	69,69	71,48	65,93	68,21	67,05
	Laki-laki+Perempuan	78,63	81,51	76,15	62,80	64,82	64,15	67,24	70,36	68,05
19-24	Laki-laki	12,23	20,82	21,55	9,83	15,77	12,29	10,49	17,50	15,37
	Perempuan	31,73	32,57	21,81	15,02	9,26	12,52	18,80	16,48	15,73
	Laki-laki+Perempuan	21,21	25,97	21,67	12,54	12,68	12,39	14,70	17,03	15,54

Sumber: BPS, Statistik Pendidikan Provinsi Jawa Tengah 2019

Dilihat dari 3 tahun terakhir, kelompok umur 7-12 tahun dan kelompok umur 13-15 tahun memiliki APS yang tinggi yaitu lebih dari 90 persen. Program wajib belajar pemerintah direspon positif oleh masyarakat. Untuk APS penduduk umur 16-18 tahun dan 19-24 tahun dari tahun ke tahun juga semakin meningkat. Hal ini menunjukkan kesadaran masyarakat untuk mengenyam pendidikan lebih tinggi semakin meningkat.

Jika dicermati, semakin tinggi kelompok umur, maka APS akan semakin mengecil. Melalui fenomena ini juga terlihat bagaimana umur sebagai salah satu karakteristik demografis ternyata dapat memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap partisipasi penduduk dalam memanfaatkan fasilitas pendidikan. Hal ini terjadi lebih karena semakin meningkatnya umur penduduk, maka kesempatan untuk mengenyam pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi semakin terbatas, baik dalam hal biaya, akses maupun kemampuan akademis.

Dari sisi fasilitas pendidikan di Kabupaten Magelang terdapat 917 sekolah setingkat SD, 198 sekolah setingkat SMP dan 101 sekolah setingkat SMA yang tersebar di kecamatan-kecamatan di Kabupaten Magelang.

Tabel 3.4 APM menurut Usia Sekolah, Jenis Kelamin, dan Daerah Tempat Tinggal di Kabupaten Magelang, 2016-2019

Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin	Perkotaan			Perdesaan			Perkotaan+Perdesaan		
		2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
SD/MI/Paket A	Laki-laki	100,00	100,00	98,37	98,47	96,88	98,37	98,97	97,93	98,37
	Perempuan	94,80	99,48	97,88	99,45	99,81	97,88	89,09	99,71	97,88
	Laki-laki + Perempuan	97,62	99,74	98,13	98,95	98,44	98,13	98,54	98,86	98,13
SMP/MTs/Paket B	Laki-laki	77,54	83,53	80,36	72,08	73,91	80,36	73,16	77,33	80,36
	Perempuan	90,40	93,88	83,44	81,82	65,72	83,44	84,31	75,43	83,44
	Laki-laki + Perempuan	84,68	88,37	81,80	76,26	70,00	81,80	78,28	76,42	81,80
SMA/SMK/Paket C	Laki-laki	83,75	61,92	62,52	44,93	52,29	62,52	57,99	52,52	62,52
	Perempuan	57,25	53,99	64,82	58,13	62,52	64,82	57,84	58,52	64,82
	Laki-laki + Perempuan	71,04	58,15	63,66	51,39	54,07	63,66	57,92	55,39	63,66
Perguruan Tinggi	Laki-laki	10,06	15,13	18,77	8,77	12,29	18,77	9,21	13,23	18,77
	Perempuan	20,39	17,68	20,41	8,40	12,44	20,41	12,12	14,31	20,41
	Laki-laki + Perempuan	14,59	16,33	19,55	8,59	12,39	19,55	10,56	13,73	19,55

Sumber: BPS, Statistik Pendidikan Provinsi Jawa Tengah 2019

Selain dari APS (Angka Partisipasi Sekolah), tingkat partisipasi sekolah diukur juga dengan APM (Angka Partisipasi Murni). APM ini digunakan untuk mengukur daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Angka APM ini memiliki pola yang hampir sama dengan angka APS. Semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin rendah Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Sekolah (APS).

APM untuk jenjang pendidikan SD tahun 2019 mencapai 98,13 persen, turun 0,73 poin dari tahun 2018. Hal ini berarti bahwa terdapat 98,13 persen penduduk Kabupaten Magelang kelompok usia

7-12 tahun yang bersekolah di SD/MI/Paket A. Meskipun sudah ditetapkan peraturan terkait batas usia masuk SD/ sederajat, namun beberapa orang tua murid terkesan mengharapkan putra/putri mereka yang berusia kurang dari 7 tahun untuk dapat bersekolah di SD/ sederajat, dengan alasan sudah mahir baca tulis. Alhasil, anak usia 6 tahun pun bisa bersekolah di SD/ sederajat, dengan syarat tertentu. Meski tidak mutlak, kondisi ini secara tidak langsung berperan dalam menyumbangkan rendahnya APM SD/ sederajat di Kabupaten Magelang pada 2019. Kendati demikian, jika disandingkan dengan sasaran yang ingin dicapai dalam Program Indonesia Pintar melalui pelaksanaan Wajib Belajar 12 tahun, yaitu target 94,8 persen APM SD/ sederajat pada 2020, maka capaian APM untuk Kabupaten Magelang sebesar 98,86 persen tersebut sudah terpenuhi.

APM Kabupaten Magelang 2019 untuk jenjang pendidikan Perguruan Tinggi (DI/DII/DIII/DIV/S1/S2/S3) naik sebesar 5,82 poin. Sedangkan untuk APM SMP/ sederajat dan SMA/ sederajat naik. Ketika penduduk sebelum usia 7 tahun sudah masuk SD, menyebabkan usia sebelum 13 tahun sudah masuk SMP/ sederajat dan usia sebelum 16 tahun sudah masuk SMA/ sederajat. Meski tidak mutlak, kondisi ini secara tidak langsung berperan dalam menyumbangkan menurunnya APM SD/ sederajat di Kabupaten Magelang pada 2019.

Menariknya, bila diamati berdasarkan jenis kelamin, APM penduduk perempuan dan penduduk laki-laki cenderung mirip di setiap jenjang pendidikan, dari SD/ sederajat hingga perguruan tinggi. Hal tersebut membuktikan bahwa disparitas gender dalam bidang pendidikan mulai berkurang. Jika diamati lebih jauh, terlihat bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan, APM akan semakin mengerucut. Tidak dipungkiri bahwa keadaan ekonomi rumah tangga memiliki andil cukup besar dalam menentukan keberlanjutan pendidikan anggota rumah tangga. Stigma yang terlanjur berkembang di masyarakat adalah semakin tinggi tingkat pendidikan maka biaya akan semakin mahal. Hal ini tentu bisa menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah terkait pembangunan pendidikan yang sudah dirancang maupun yang sebagian sudah dilaksanakan, demi mengejar ketertinggalan.

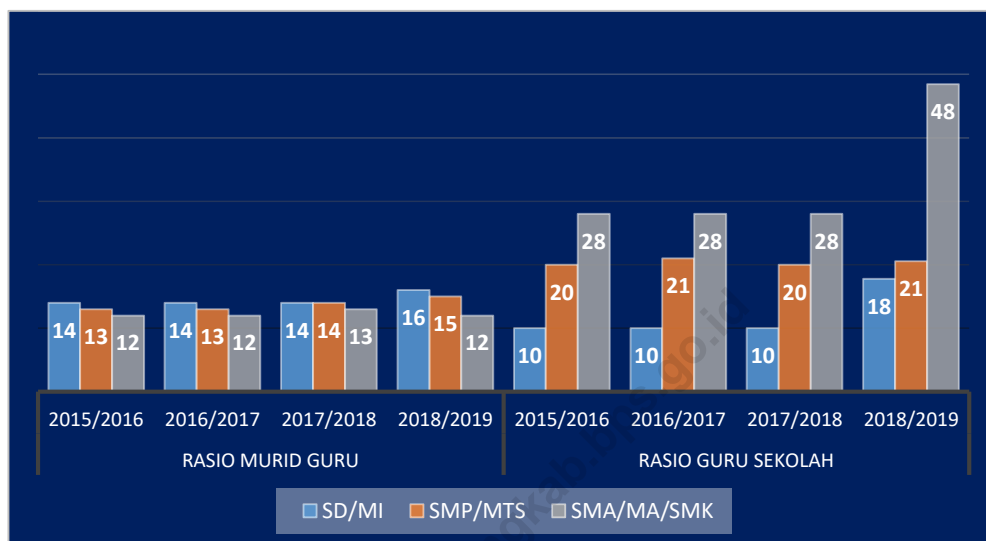
### 3.4. Kualitas Pelayanan Pendidikan

Salah satu faktor yang menentukan keberhasilan program pembangunan nasional khususnya dalam bidang pendidikan yaitu pelayanan pendidikan yang baik dan berkualitas. Oleh karena itu, peningkatan mutu layanan pendidikan merupakan program utama pemerintah untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dalam rangka mencerdaskan bangsa. Beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui kualitas pelayanan pendidikan antara lain rasio murid guru, rasio guru sekolah, dan rasio murid kelas. Namun, karena ketersediaan data, dalam bab ini hanya dibahas mengenai rasio murid guru dan rasio guru sekolah.

Rasio murid guru adalah jumlah murid dibandingkan dengan jumlah guru pada setiap jenjang pendidikan. Rasio murid per guru dapat memberikan gambaran mengenai besarnya beban kerja guru dalam mengajar. Rasio ini digunakan untuk mengetahui rata-rata jumlah murid yang dilayani oleh satu orang guru di suatu sekolah atau daerah tertentu. Semakin tinggi nilai rasionya, diduga akan semakin berkurang pengawasan atau perhatian guru terhadap murid sehingga kualitas pengajaran akan cenderung semakin rendah.

Selama 4 tahun terakhir, rasio murid guru untuk jenjang pendidikan SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK relatif stabil dengan tren yang cenderung meningkat. Pada 2019, rasio guru SD/MI adalah 16, artinya setiap 1 orang guru mengampu 16 murid SD/MI. Kenaikan rasio murid guru dua tahun terakhir lebih disebabkan meningkatnya jumlah murid. Peningkatan rasio murid guru dikhawatirkan dapat menyebabkan proses belajar mengajar menjadi kurang efektif karena beban guru bertambah.

Gambar 3.5 Perkembangan Rasio Murid Guru dan Guru Sekolah di Kabupaten Magelang, 2015/2016-2019/2020



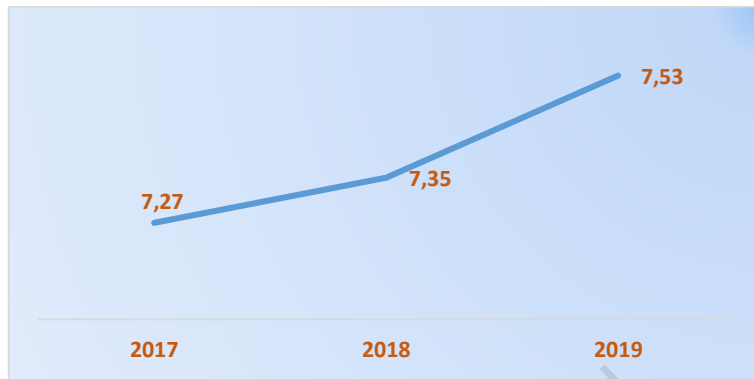
Sumber: BPS, Statistik Pendidikan Provinsi Jawa Tengah 2019

Tidak jauh berbeda dengan rasio murid guru, rasio guru sekolah juga relatif stabil, meskipun untuk jenjang pendidikan SMP/MTs rasio nya mengalami penurunan, yang semula 20 pada 2018 menjadi 21 pada 2019. Dengan rasio guru sekolah yang terstandar, harapannya, proses belajar-mengajar akan semakin efektif di tiap sekolah.

### 3.5. Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah (mean years of schooling) merupakan indikator yang menunjukkan rata-rata jumlah tahun efektif untuk bersekolah yang dicapai penduduk. Jumlah tahun efektif adalah jumlah tahun standar yang harus dijalani oleh seseorang untuk menamatkan suatu jenjang pendidikan, misalnya tamat SD adalah 6 tahun, tamat SMP adalah 9 tahun dan seterusnya. Perhitungan lama sekolah dilakukan tanpa memperhatikan apakah seseorang menamatkan sekolah lebih cepat atau lebih lama dari waktu yang telah ditetapkan.

Gambar 3.6 Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Berusia 25 Tahun ke Atas 2017-2019



Sumber: BPS, Statistik Pendidikan Provinsi Jawa Tengah 2019

Rata-rata lama sekolah (mean years of schooling) Kabupaten Magelang tahun 2019 penduduk usia 25 tahun ke atas sebesar 7,53 tahun. Artinya rata-rata penduduk usia 25 tahun ke atas di Kabupaten Magelang mencapai jenjang pendidikan kelas 1 SMP (kelas VII) atau putus sekolah di kelas 2 SMP (Kelas VIII).



## BAB 4 KETENAGAKERJAAN

**K**etenagakerjaan merupakan salah satu masalah yang menjadi perhatian pemerintah. Berbagai masalah bidang ketenagakerjaan yang dihadapi pemerintah antara lain tingginya tingkat pengangguran, rendahnya perluasan kesempatan kerja yang terbuka, rendahnya kompetensi, serta pekerja anak.

Pembangunan di bidang ketenagakerjaan merupakan bagian dari upaya pengembangan sumber daya manusia yang memegang peranan penting untuk mewujudkan pembangunan manusia seutuhnya. Oleh sebab itu, pembangunan di bidang ketenagakerjaan diupayakan memberikan kontribusi yang nyata dan terukur dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penduduk dipandang dari sisi ketenagakerjaan merupakan suplai bagi pasar tenaga kerja di suatu wilayah. Namun tidak semua penduduk mampu melakukannya karena hanya penduduk yang berusia kerjalah yang bisa menawarkan tenaganya di pasar kerja. Konsep ketenagakerjaan yang diusung BPS adalah *The Labor Force Concept*, merujuk pada rekomendasi *International Labour Organization* (ILO). Penduduk usia kerja dibagi menjadi dua kelompok yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Usia kerja di Indonesia mengikuti standar internasional yaitu usia 15 tahun atau lebih. Angkatan kerja sendiri terdiri dari mereka yang aktif bekerja dan mereka yang sedang mencari pekerjaan (atau sering disebut sebagai pengangguran terbuka). Sedangkan kelompok bukan angkatan kerja adalah mereka yang masih bersekolah, mengurus rumah tangga, pensiunan dan lain-lain.

Beberapa indikator yang menggambarkan ketenagakerjaan, seperti Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), persentase penduduk yang bekerja menurut kelompok lapangan usaha, dan jumlah jam kerja akan dibahas dalam bab ini.

## 4.1. Kondisi Angkatan Kerja Kabupaten Magelang

Angkatan kerja adalah mereka yang berumur 15 tahun ke atas dan selama seminggu yang lalu mempunyai pekerjaan, baik yang bekerja maupun yang sementara tidak bekerja karena suatu sebab, seperti sedang menunggu panen atau cuti. Di samping itu, mereka yang tidak mempunyai pekerjaan tetapi sedang mencari pekerjaan/mengharapkan dapat pekerjaan juga termasuk dalam kelompok angkatan kerja. Bukan angkatan kerja adalah mereka yang berumur 15 tahun ke atas dan selama seminggu yang lalu hanya bersekolah, mengurus rumah tangga atau lainnya, serta tidak melakukan suatu kegiatan yang dapat dimasukkan dalam kategori bekerja, sementara tidak bekerja, atau mencari pekerjaan.

Tabel 4.1 Penduduk Kabupaten Magelang Berumur 15 Tahun ke Atas dan Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu, 2019

Keterangan	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
<b>Angkatan Kerja</b>	<b>234.156</b>	<b>506.945</b>	<b>741.101</b>
Bekerja	223.716	494.241	717.957
Pernah Bekerja	6.372	6.755	13.127
Tidak Pernah Bekerja	4.068	5.949	10.017
<b>Bukan Angkatan Kerja</b>	<b>95.281</b>	<b>157.657</b>	<b>252.938</b>
Sekolah	21.498	36.491	57.989
Mengurus Rumah Tangga	55.31	100.857	156.167
Lainnya	18.473	20.309	38.782
<b>Penduduk 15 Tahun Ke Atas</b>	<b>329.437</b>	<b>664.602</b>	<b>994.039</b>
<b>Persentase Bekerja Terhadap Angkatan Kerja</b>	<b>95,94</b>	<b>97,49</b>	<b>96,88</b>
<b>Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)</b>	<b>4,46</b>	<b>2,51</b>	<b>3,12</b>
<b>Persentase Angkatan Kerja Terhadap Usia Kerja</b>	<b>71,08</b>	<b>76,28</b>	<b>74,55</b>

Sumber: BPS, Keadaan Angkatan Kerja Provinsi Jawa Tengah 2019

Selama tahun 2019, penduduk Kabupaten Magelang berusia 15 tahun ke atas, sebagian besar tinggal di daerah perdesaan. Persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja di daerah perdesaan lebih besar dibanding daerah perkotaan. Sebanyak 76,28 persen penduduk usia 15

tahun ke atas di daerah perdesaan bekerja, sementara di daerah perkotaan hanya sebesar 71,08 persen. Sementara untuk persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang bersekolah di daerah perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan persentase penduduk usia 15 tahun ke atas di daerah perdesaan yang bersekolah. Sebanyak 6,53 persen penduduk berusia 15 tahun ke atas di daerah perkotaan yang bersekolah, sementara di daerah perdesaan sebesar 5,49 persen.

## **4.2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)**

Keterlibatan penduduk yang aktif dalam kegiatan ekonomi diukur dari banyaknya penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang masuk dalam pasar kerja, baik mereka yang statusnya bekerja atau yang mencari pekerjaan (menganggur). Indikator yang digunakan untuk mengukur besaran tersebut adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). TPAK memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi. Indikator ini diperoleh dari perbandingan angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja.

Selain TPAK, dalam analisis angkatan kerja juga dikenal indikator yang digunakan untuk mengukur pengangguran yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Pengangguran terbuka didefinisikan sebagai orang yang sedang mencari pekerjaan atau yang sedang mempersiapkan usaha atau juga yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin lagi mendapatkan pekerjaan, termasuk juga mereka yang baru mendapat kerja tetapi belum mulai bekerja. Pengangguran terbuka tidak termasuk orang yang masih sekolah atau mengurus rumah tangga, sehingga hanya orang yang termasuk angkatan kerja saja yang merupakan pengangguran terbuka. TPT dihitung dari perbandingan antara banyaknya jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja.

Berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), TPAK Kabupaten Magelang selama lima tahun terakhir menunjukkan capaian yang tidak stabil. Pada 2015, TPAK Kabupaten Magelang sebesar 71,76 persen. Kemudian pada 2015, TPAK Kabupaten Magelang menurun 2,13 poin menjadi 69,63 persen. Berbeda dengan capaian tahun sebelumnya, pada 2016, TPAK Kabupaten Magelang justru menunjukkan penurunan sangat signifikan, menjadi 69,63 persen.

Tahun 2019, TPAK Kabupaten Magelang mencapai 74,55 persen. Naik 3,27 poin dari tahun 2018. Meskipun tidak menggambarkan baik buruknya kondisi ketenagakerjaan di suatu wilayah secara utuh, namun kenaikan TPAK ini sesungguhnya menunjukkan indikasi meningkatnya kecenderungan penduduk ekonomi aktif untuk mencari atau melakukan kegiatan ekonomi.

Tidak jauh berbeda dengan TPAK, capaian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) juga terlihat fluktuatif. Berbanding terbalik dengan TPAK yang meningkat, TPT tahun 2019 naik 0,21 poin dibanding tahun 2018. Meski TPT naik, akan tetapi besarnya pengangguran terbuka di Kabupaten Magelang masih terkendali. Pengendalian angka pengangguran diharapkan mampu memberi peluang yang lebih besar dalam rangka mengentaskan kemiskinan.

Gambar 4.1 Perkembangan TPAK dan TPT (%) di Kabupaten Magelang, 2014-2019



Sumber: BPS, Keadaan Angkatan Kerja Provinsi Jawa Tengah 2019

### 4.3. Lapangan Usaha dan Status Pekerjaan

Distribusi penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha merupakan salah satu ukuran untuk melihat potensi ekonomi dalam melihat penyerapan tenaga kerja. Ukuran ini memberikan gambaran sektor mana yang dominan menyerap tenaga kerja dan sebaliknya. Distribusi

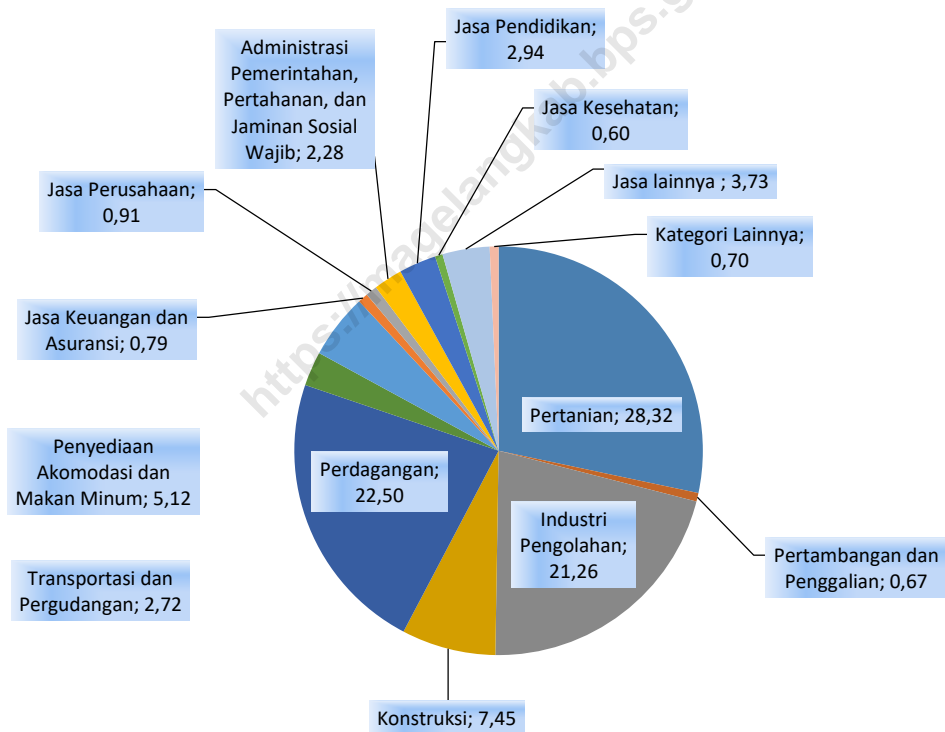
penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha pada subbab ini dikelompokkan menjadi 14 sektor lapangan usaha yaitu

1. Pertanian (pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan)
2. Pertambangan dan Penggalian
3. Industri Pengolahan
4. Konstruksi
5. Perdagangan (perdagangan besar dan eceran, serta reparasi mobil dan motor)
6. Transportasi dan Pergudangan
7. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
8. Jasa Keuangan dan Asuransi
9. Jasa Perusahaan
10. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib
11. Jasa Pendidikan
12. Jasa Kesehatan
13. Jasa lainnya
14. Kategori Lainnya (Pengadaan Listrik dan Gas, Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang)

Pertanian (pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan) masih menjadi mata pencaharian terbesar penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja selama seminggu yang lalu tahun 2019 yaitu sebesar 28,32 persen. Perdagangan yang terdiri dari perdagangan besar dan eceran, serta reparasi mobil dan motor menjadi penyerap lapangan usaha terbesar kedua di Kabupaten Magelang pada penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja selama seminggu yang lalu yaitu sebesar 22,50 persen. Industri pengolahan merupakan sektor penyerap lapangan usaha terbesar ketiga setelah pertanian di Kabupaten Magelang pada penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja selama seminggu yang lalu yaitu sebesar 21,26 persen. Meski di Kabupaten Magelang merupakan salah satu kabupaten penghasil pasir, akan tetapi penyerapan tenaga kerja pada lapangan usaha ini untuk penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja selama seminggu yang lalu masih sangat sedikit, hanya sebesar 0,67 persen. Pertumbuhan pariwisata di Kabupaten

Magelang juga belum banyak menyerap tenaga kerja. Penyerapan tenaga kerja pada lapangan usaha penyediaan akomodasi makan dan minum baru berkisar 5,12 persen. Hal ini menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Magelang, mengingat di Kabupaten Magelang terdapat salah satu warisan budaya dunia yaitu Candi Borobudur dan berbagai macam sektor pariwisata yang telah dikembangkan. Penyerapan tenaga kerja yang maksimal akan meningkatkan penghasilan dan menurunkan angka kemiskinan serta masalah-masalah pembangunan yang lainnya.

Gambar 4.2 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu Lalu Menurut Kelompok Lapangan Usaha di Kabupaten Magelang, 2019



Sumber: BPS, Keadaan Angkatan Kerja Provinsi Jawa Tengah 2019

Apabila dilihat berdasarkan daerah perkotaan dan perdesaan, perdagangan (perdagangan

besar dan eceran serta reparasi mobil dan motor) merupakan lapangan usaha yang banyak menyerap tenaga kerja pada penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja selama seminggu yang lalu di perkotaan, sedangkan pertanian (pertanian, kehutanan, perburuan, dan perikanan) merupakan lapangan usaha yang banyak menyerap tenaga kerja pada penduduk 15 tahun ke atas yang bekerja selama seminggu yang lalu di perdesaan. Banyaknya penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja selama seminggu yang lalu dirinci pada tabel 4.2.

Tabel 4.2 Penduduk Kabupaten Magelang Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Berdasarkan Lapangan Usaha dan Tipe Daerah, 2019

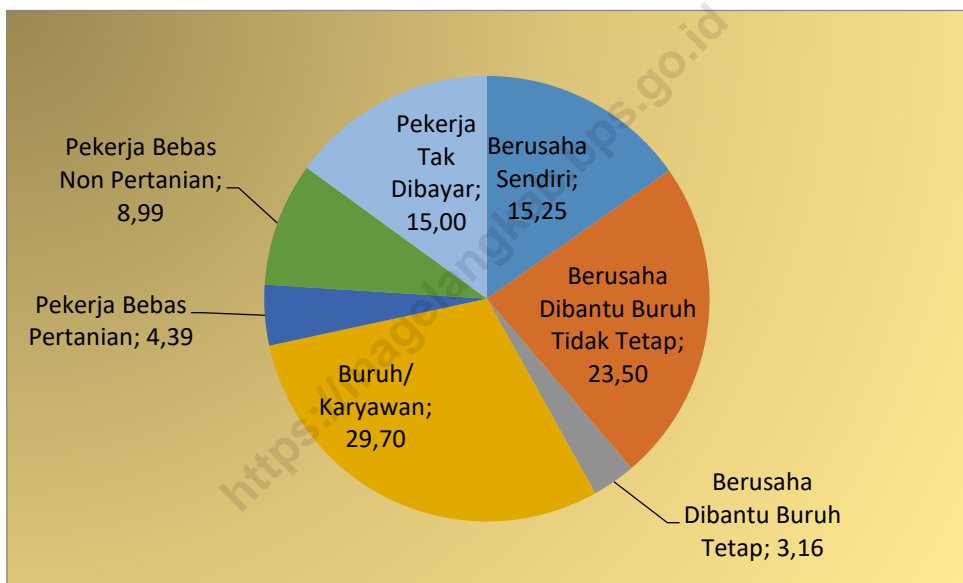
Lapangan Usaha	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>Pertanian</b>	29 330	174 013	101 559
<b>Pertambangan dan Penggalian</b>	805	4 032	2 956
<b>Industri Pengolahan</b>	60 547	92 067	28 483
<b>Konstruksi</b>	12 324	41 197	32 248
<b>Perdagangan</b>	52 735	108 830	37 429
<b>Transportasi dan Pergudangan</b>	9 662	9 839	9 033
<b>Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum</b>	18 810	17 941	9 569
<b>Jasa Keuangan dan Asuransi</b>	2 088	3 580	4 215
<b>Jasa Perusahaan</b>	1 420	5 106	4 541
<b>Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib</b>	6 903	9 468	10 914
<b>Jasa Pendidikan</b>	9 292	11 843	8 976
<b>Jasa Kesehatan</b>	1 923	2 383	1 182
<b>Jasa lainnya</b>	14 920	11 885	10 413
<b>Kategori Lainnya</b>	2 957	2 057	3 494
<b>Jumlah</b>	223 716	494 241	265 012

Sumber: BPS, Keadaan Angkatan Kerja Provinsi Jawa Tengah 2019

Menurut status pekerjaan utama, persentase terbesar penduduk Kabupaten Magelang yang

bekerja selama 2019 adalah sebagai buruh/karyawan, dengan capaian sebesar 29,70 persen. Selanjutnya, persentase terbesar kedua adalah berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar, 23,50 persen, sedangkan status berusaha dibantu buruh tetap berada pada proporsi terendah, yaitu 3,16 persen. Sementara itu, proporsi penduduk dengan status pekerja bebas dan pekerja tidak dibayar mencapai 28,39 persen.

Gambar 4.3 Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang lalu Menurut Status Pekerjaan Utama di Kabupaten Magelang, 2019



Sumber : BPS, Keadaan Angkatan Kerja Provinsi Jawa Tengah 2019



## BAB 5 TARAF DAN POLA KONSUMSI

### 5.1. Pengeluaran Rumah Tangga

**S**alah satu teori ekonomi yang sangat erat kaitannya dengan pengeluaran konsumsi dan tingkat kesejahteraan adalah teori yang dinyatakan oleh Ernest Engel pada tahun 1857 (Wuryandari, 2012). Hasil studi empiris Engel adalah (1) kategori/proporsi terbesar dari anggaran keluarga adalah makanan, (2) proporsi pengeluaran total untuk makanan menurun seiring dengan meningkatnya pendapatan, (3) proporsi pengeluaran total untuk pakaian dan perumahan diperkirakan konstan, sementara proporsi pengeluaran untuk barang-barang mewah bertambah ketika pendapatan mulai meningkat. Dari ketiga hasil studi empiris Engel tersebut, temuan kedua adalah temuan yang lazim berlaku hingga saat ini.

Selanjutnya, perkembangan tingkat kesejahteraan dapat diamati berdasarkan perubahan persentase pengeluaran yang dialokasikan untuk non-makanan. Semakin tinggi persentase pengeluaran non-makanan, makin tinggi tingkat kesejahteraan. Ernest Engel dalam Salvatore (2006), mengemukakan bahwa apabila selera tidak berbeda maka persentase pengeluaran untuk makanan akan menurun seiring meningkatnya pendapatan. Oleh karena itu, komposisi pengeluaran rumah tangga dapat dijadikan ukuran dalam menilai tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk. Sejalan dengan hal tersebut, Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan pengeluaran rumah tangga sebagai rata-rata biaya yang dikeluarkan rumah tangga untuk konsumsi rumah tangga.

Data rata-rata pengeluaran per kapita sebulan untuk komoditas makanan dan nonmakanan (bukan makanan) disajikan dalam Tabel 5.1. Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa selama 2017-2019 persentase pengeluaran per kapita sebulan untuk komoditas bukan makanan lebih tinggi daripada komoditas makanan, dengan persentase yang terus meningkat. Persentase pengeluaran

per kapita sebulan untuk komoditas makanan pada 2019 adalah sebesar 46,09 persen, menurun 3,21 poin jika dibandingkan 2018, yang mencapai 49,30 persen. Berbanding terbalik dengan komoditas makanan, persentase pengeluaran per kapita sebulan untuk komoditas bukan makanan tahun 2019 sebesar 53,91 persen justru semakin meningkat 3,21 poin dibanding tahun 2018 yang mencapai 50,70 persen.

Tabel 5.1 Rata-rata Pengeluaran Per kapita Sebulan menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Magelang, 2017-2019

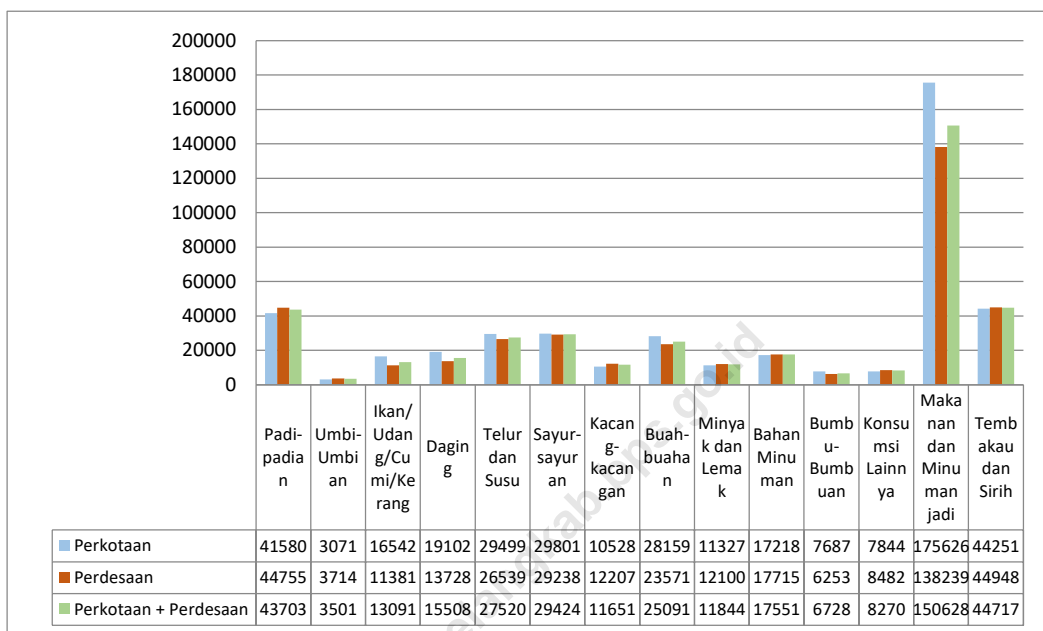
Jenis Pengeluaran	Rata-rata Pengeluaran Per kapita Sebulan					
	Nominal (Rp)			Persentase (%)		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Makanan	323,814	394,238	409,227	49,55	49,30	46,09
Bukan Makanan	329,724	405,415	478,606	50,45	50,70	53,91
Perumahan	144,893	168,943	185,920	22,17	21,13	20,94
Barang dan Jasa	84,439	106,899	118,966	12,92	13,37	13,40
Pakaian	17,901	26,864	33,133	2,74	3,36	3,73
Barang Tahan Lama	46,98	58,338	91,809	7,19	7,3	10,34
Lainnya	35,511	44,371	48,778	5,43	5,55	5,49
<b>Total Pengeluaran</b>	<b>653,538</b>	<b>799,653</b>	<b>887,833</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Sumber: BPS, Pengeluaran untuk Konsumsi Penduduk Provinsi Jawa Tengah 2019

Tren persentase pengeluaran per kapita sebulan untuk komoditas bukan makanan yang semakin meningkat memberikan indikasi bahwa tingkat kesejahteraan penduduk semakin meningkat, Secara deskriptif, hasil ini turut mendukung hasil studi empiris yang dikemukakan oleh Engel bahwa proporsi pengeluaran total untuk makanan akan menurun seiring dengan meningkatnya pendapatan,

Secara nominal, total pengeluaran rata-rata penduduk Kabupaten Magelang Tahun 2019 sebesar 887,833 rupiah per kapita per bulan. Naik sebesar 88,180 rupiah dibanding tahun 2018, Pengeluaran makanan penduduk Kabupaten Magelang sebesar 409,227 rupiah per kapita per bulan, naik 14,989 rupiah dibanding tahun 2018. Sedangkan untuk non makanan sebesar 478,606 rupiah per kapita per bulan, naik 73,191 rupiah dibanding tahun 2018.

Gambar 5.1 Rata-rata Pengeluaran Makanan per Kapita per Bulan Menurut Kelompok Komoditas dan Daerah Tempat Tinggal Kabupaten Magelang, 2019



Sumber: BPS, Pengeluaran untuk Konsumsi Penduduk Provinsi Jawa Tengah 2019

Rata-rata pengeluaran makanan per kapita per bulan penduduk Kabupaten Magelang menurut komoditas antara daerah perkotaan dan perdesaan memiliki tren yang sama. Pengeluaran terbesar digunakan untuk mengkonsumsi makanan dan minuman jadi. Konsumsi makanan jadi di daerah perkotaan sebesar 42,92 persen dan daerah perdesaan sebesar 33,78 persen dari seluruh total pengeluaran makanan. Tren wisata kuliner secara tidak langsung mempengaruhi pola konsumsi masyarakat di Kabupaten Magelang.

Pengeluaran terbesar selanjutnya adalah untuk komoditas tembakau dan sirih. Komoditas tembakau dan sirih merupakan pengeluaran penduduk terbesar kedua baik di perkotaan maupun perdesaan. Hal ini menunjukkan bahwa pengeluaran untuk merokok memiliki porsi besar baik di daerah perkotaan maupun perdesaan. Pengeluaran untuk komoditas tembakau dan sirih memakan porsi 10,81 persen dari total pengeluaran makanan untuk daerah perkotaan, dan 10,98 persen dari total pengeluaran makanan untuk daerah perdesaan. Meski beras merupakan makanan pokok di Kabupaten Magelang, akan tetapi komoditas padi-padian merupakan

pengeluaran terbesar ketiga sebesar 10,16 persen untuk daerah perkotaan dan 10,94 persen untuk daerah perkotaan dari total pengeluaran per kapita per bulan.

## **5.2. Konsumsi Energi dan Konsumsi Protein**

Konsumsi adalah pengeluaran untuk pembelian barang-barang dan jasa akhir guna mendapatkan kepuasan ataupun memenuhi kebutuhannya (Samuelson & Nordhaus, 1996), Oleh karena itu konsumsi dalam istilah sehari-hari seringkali diartikan sebagai pemenuhan akan kebutuhan makanan dan minuman.

BPS membedakan konsumsi rumah tangga menjadi dua kelompok, yaitu: konsumsi makanan dan bukan makanan. Untuk konsumsi makanan, paket komoditas kebutuhan dasar diwakili oleh 52 jenis komoditas, yaitu: padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dan lain-lain.

Kemudian untuk konsumsi bukan makanan, paket komoditas kebutuhan dasar diwakili oleh 51 jenis komoditas di perkotaan dan 47 jenis komoditas di perdesaan (BPS, 2016), seperti kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan, dan lain-lain. Konsumsi tersebut tanpa memperhatikan asal barang (membeli atau hasil sendiri atau pemberian) dan terbatas pada pengeluaran untuk kebutuhan rumah tangga saja, tidak termasuk konsumsi/pengeluaran untuk keperluan usaha rumah tangga atau diberikan kepada pihak lain.

Tingkat kecukupan gizi, yang mencakup konsumsi kalori dan protein merupakan indikator lain yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk. Jumlah konsumsi kalori dan protein dihitung berdasarkan jumlah dari hasil kali antara kuantitas setiap makanan yang dikonsumsi dengan besarnya kandungan kalori dan protein dalam setiap makanan tersebut. Angka Kecukupan Gizi (AKG) yang dianjurkan adalah suatu kecukupan rata-rata zat gizi setiap hari bagi semua orang menurut golongan umur, jenis kelamin, ukuran tubuh dan aktivitas tubuh untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 75 Tahun 2014 (Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi XI tahun 2013), rata-rata kecukupan energi dan protein bagi penduduk Indonesia masing-masing sebesar 2,150 kkal dan 57 gram protein.

Tabel 5.2 Rata-rata Konsumsi Energi dan Protein Per Kapita Per hari di Kabupaten Magelang, 2017-2019

Konsumsi	Tahun	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan+ Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Energi (kkal)	2017	1,826,62	1,812,06	1,816,56
	2018	2,044,62	1,953,99	1,984,02
	2019	1,881,13	1,921,85	1,908,36
Protein (gram)	2017	51,95	47,55	48,91
	2018	57,64	52,51	54,21
	2019	54,58	54,82	54,74

Sumber: BPS, Pengeluaran untuk Konsumsi Penduduk Provinsi Jawa Tengah 2019

Tabel 5.2 menyajikan rata-rata konsumsi energi dan protein per kapita perhari. Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa rata-rata konsumsi energi dari penduduk di Kabupaten Magelang pada 2019 mengalami penurunan 3,81 persen, menjadi 1.908,36 kilo kalori per kapita perhari. Meskipun konsumsi energi mengalami penurunan, rata-rata konsumsi protein di Kabupaten Magelang mengalami kenaikan, sebesar 0,98 persen menjadi 54,74 gram per kapita perhari.

Sementara itu, berdasarkan daerah tempat tinggal, selama kurun waktu 2017-2018, terlihat bahwa konsumsi energi dan protein di daerah perkotaan lebih tinggi daripada perdesaan. Namun pada tahun 2019 konsumsi energi dan protein di daerah perdesaan lebih tinggi daripada perkotaan. Konsumsi energi di daerah perdesaan tahun 2019 mencapai 1.921,85 kilo kalori, sedangkan di perkotaan 1.881,13 kilo kalori per kapita perhari.

Seperti halnya konsumsi energi, rata-rata konsumsi protein di daerah perdesaan juga lebih besar daripada perkotaan. Berdasarkan hasil olah data Susenas, didapatkan konsumsi protein untuk daerah perkotaan pada 2019 mencapai 54,58 gram, sedangkan untuk daerah perdesaan sebesar 54,82 gram per kapita perhari. Konsumsi energi dan protein tahun 2019 masih di bawah angka kecukupan energi dan protein yang disyaratkan oleh Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi, yaitu 2.150 kilo kalori dan 57 gram protein.

## BAB 6 PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN

### 6.1. Pengeluaran Rumah Tangga

Rumah dan kelengkapannya merupakan kebutuhan dasar dan juga merupakan salah satu faktor penentu indikator kesejahteraan rakyat. Rumah mempunyai pengaruh terhadap pembinaan watak dan kepribadian serta merupakan faktor penting terhadap produktivitas kerja dan kreativitas kerja seseorang. Selain itu rumah juga mempunyai fungsi strategis sebagai pusat pendidikan keluarga, persemaian budaya, dan peningkatan kualitas generasi yang akan datang. Dengan meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat melalui pemenuhan kebutuhan papan, diharapkan dapat terwujud kesejahteraan rakyat.

Kualitas lingkungan rumah tinggal berpengaruh terhadap status kesehatan penghuninya. Kualitas rumah tinggal yang baik dalam lingkungan sehat, aman, lestari dan berkelanjutan menurut Kepmen (1999) diartikan sebagai suatu kondisi rumah yang memenuhi standar minimal dari segi kesehatan, sosial, budaya, ekonomi dan kualitas teknis.

Perumahan merupakan kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan fasilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. Selain sebagai tempat tinggal, rumah seringkali menunjukkan status sosial seseorang, Status sosial seseorang berhubungan positif dengan kualitas/kondisi rumah. Semakin tinggi status sosial seseorang semakin besar peluang untuk memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal dengan kualitas yang lebih baik.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman disebutkan dalam Pasal 1 ayat 7 bahwa rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai

tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya. Kondisi perumahan (karakteristik perumahan) dapat menjadi ukuran kesejahteraan suatu rumah tangga. Salah satu arah kebijakan dan strategi pada RPJMN 2016-2020 adalah pembangunan infrastruktur/prasarana dasar yang meliputi perumahan yang layak, akses terhadap listrik, air minum, dan sanitasi. Pencapaian sasaran kebijakan tersebut memerlukan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan program oleh berbagai sektor terkait, sehingga fokus kepada target yang sama.

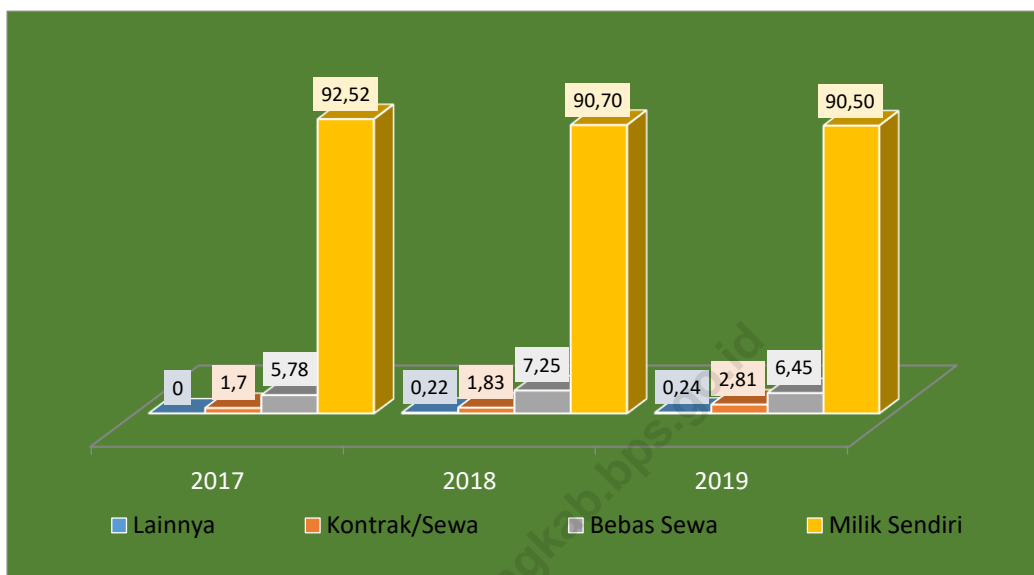
Salah satu dari sekian banyak fasilitas yang dapat mencerminkan kesejahteraan rumah tangga adalah kualitas material seperti jenis atap, dinding dan lantai terluas yang digunakan, termasuk juga fasilitas penunjang lain yang meliputi luas lantai hunian, sumber air minum, fasilitas tempat buang air besar, dan sumber penerangan. Kualitas perumahan yang baik dan penggunaan fasilitas perumahan yang memadai akan memberikan kenyamanan bagi penghuninya.

## **6.2. Kondisi Fisik Tempat Tinggal**

Salah satu indikator yang digunakan untuk melihat tingkat kesejahteraan dan juga peningkatan taraf hidup masyarakat adalah status kepemilikan rumah tinggal. Kondisi ekonomi rumah tangga sangat berpengaruh terhadap kepemilikan rumah tinggal. Status kepemilikan rumah tinggal yang dicakup di sini adalah rumah milik sendiri, kontrak, sewa, bebas sewa, rumah dinas, rumah milik orang tua/saudara atau status kepemilikan lainnya. Rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri dapat dikatakan telah mampu memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal yang terjamin dan permanen dalam jangka panjang.

Berdasarkan Susenas 2019, di Kabupaten Magelang terdapat 90,50 persen rumah tangga yang bertempat tinggal di rumah milik sendiri, sedangkan sisanya, sebesar 9,50 persen bukan milik sendiri. Rumah tangga yang menempati rumah namun bukan milik sendiri tersebut terdiri dari 2,81 persen kontrak/sewa, 6,45 persen bebas sewa, dan 0,24 persen lainnya

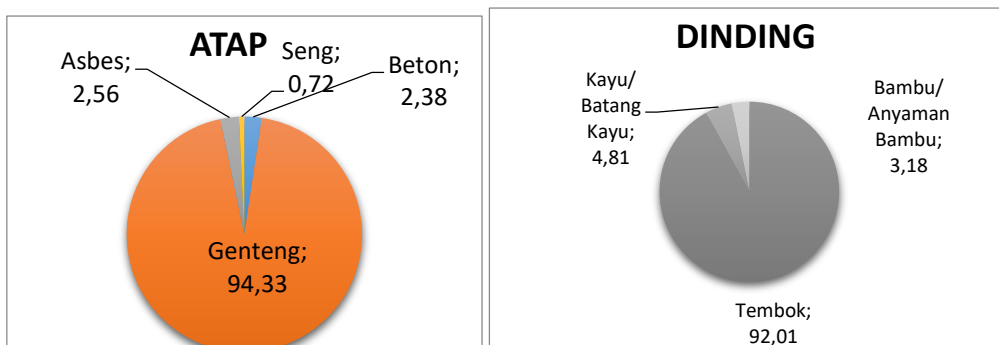
Gambar 6.1 Persentase Rumah Tangga Menurut Status Kepemilikan Rumah Tinggal di Kabupaten Magelang, 2017-2019



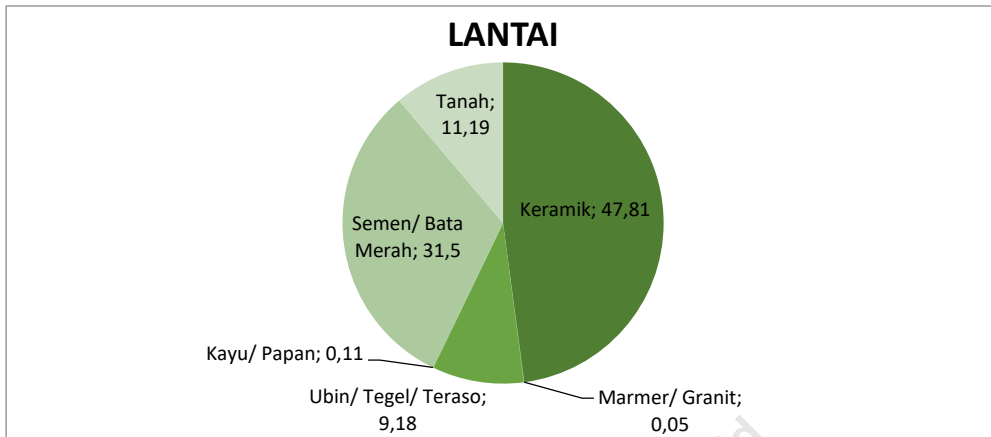
Sumber: BPS, Profil Tempat Tinggal Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019

Berdasarkan Susenas 2019, di Kabupaten Magelang terdapat 90,50 persen rumah tangga yang bertempat tinggal di rumah milik sendiri, sedangkan sisanya, sebesar 9,50 persen bukan milik sendiri. Rumah tangga yang menempati rumah namun bukan milik sendiri tersebut terdiri dari 2,81 persen kontrak/sewa, 6,45 persen bebas sewa, dan 0,24 persen lainnya

Gambar 6.2 Persentase Rumah Tangga Berdasarkan Jenis Dinding Terluas, Atap Terluas, dan Lantai Terluas Bangunan Tempat Tinggal di Kabupaten Magelang, 2019







Sumber: BPS, Profil Tempat Tinggal Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019

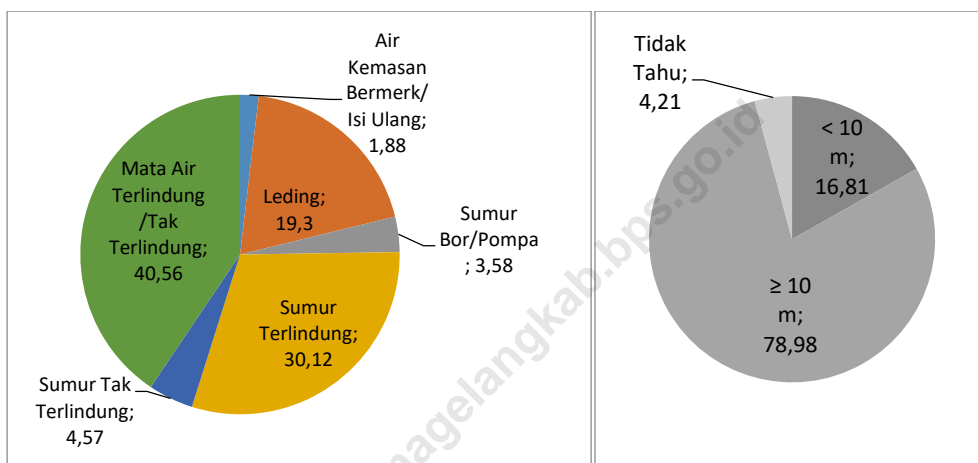
Berdasarkan Susenas 2019, sebanyak 92,01 persen rumah tangga memiliki dinding terluas berupa tembok. Kayu/batang kayu merupakan dinding terluas kedua yang dimiliki oleh rumah tangga di Kabupaten Magelang, sedangkan dinding dengan bambu/anyaman bambu sebanyak 3,18 persen. Untuk bangunan atap, 94,33 persen rumah tangga sudah beratapkan genteng, Sisanya asbes, beton, dan seng. Tidak ada rumah tangga yang beratapkan daun/rumbia/ijuk, Keramik menjadi lantai terluas sebagian besar rumah tangga. Sebanyak 47,81 persen rumah tangga sudah berlantaikan keramik. Untuk semen/bata merah, dimiliki sebanyak 31,5 persen rumah tangga, Hanya 11,19 persen saja yang berlantaikan tanah.

### 6.3. Fasilitas Rumah Tinggal

Secara harfiah, rumah merupakan bangunan buatan manusia yang dijadikan tempat tinggal selama periode waktu tertentu. Rumah merupakan salah satu kebutuhan primer dalam hidup manusia, oleh karena itu rumah sangat berperan penting dalam keberlangsungan hidup seseorang. Rumah tidak lagi hanya sekedar tempat berlindung, namun sudah merupakan bagian hidup yang mencakup banyak pengaruh, seperti pengaruh terhadap kesehatan anggota rumah tangga yang menempati rumah tersebut atau bisa juga pengaruh terhadap status sosial ekonomi. Karena hal tersebut diperlukan rumah yang ideal yakni rumah yang memiliki sarana, prasarana, dan utilitas yang memadai sesuai dengan yang tercantum pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Fasilitas-

fasilitas dasar yang semestinya tersedia dalam setiap rumah untuk menunjang kenyamanan dan kesehatan para penghuninya. Fasilitas-fasilitas dasar tersebut adalah air minum/air bersih, sumber penerangan, dan fasilitas buang air besar.

Gambar 6.3 Persentase Rumah Tangga Berdasarkan Sumber Air Minum dan Jarak Sumber Air Minum ke Tempat Penampungan Kotoran/Tinja di Kabupaten Magelang, 2019

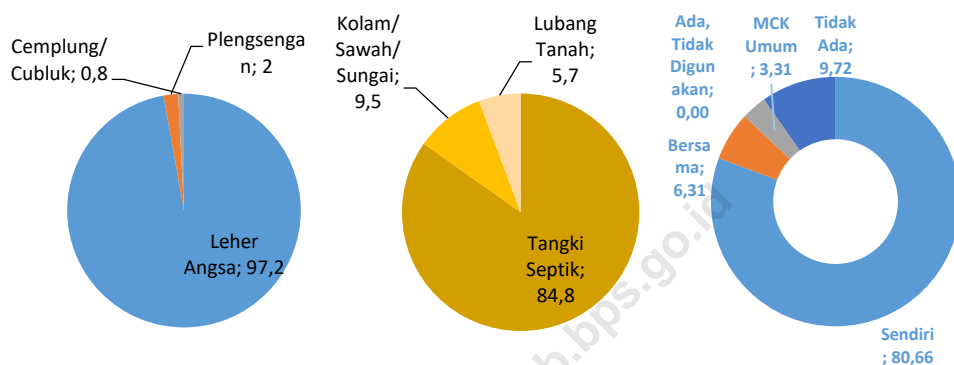


Sumber: BPS, Profil Tempat Tinggal Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019

Sumur dan mata air menjadi sumber air terbesar yang banyak digunakan oleh rumah tangga di Kabupaten Magelang. Pengguna sumur sebanyak 38,27 persen rumah tangga menggunakan sumur yang terdiri dari 4,57 persen sumur tak terlindung, 30,12 persen sumur terlindung, dan 3,58 persen sumur bor/pompa. Pengguna mata air sebanyak 40,56 persen dari rumah tangga. Sisanya air kemasan, ledeng, dan air permukaan. Sedangkan jarak penampungan kotoran/tinja ke sumber mata air 78,98 persen rumah tangga sudah berjarak  $\geq 10$  m.

Fasilitas buang air besar yang sehat memperhatikan jumlah pengguna dari fasilitas tersebut, semakin sedikit jumlah pengguna akan semakin baik. Susenas Maret 2019 membagi kriteria penggunaan kloset sendiri, bersama, umum, ada fasilitas tetapi tidak digunakan, dan tidak ada fasilitas buang air besar.

Gambar 6.4 Persentase Rumah Tangga Berdasarkan Fasilitas Buang Air Besar, Jenis Kloset, dan Tempat Pembuangan Akhir Tinja di Kabupaten Magelang, 2019



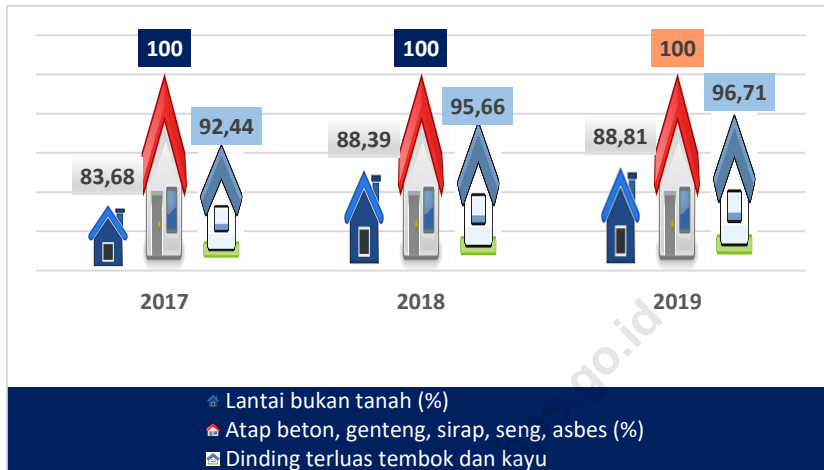
Sumber: BPS, Profil Tempat Tinggal Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019

Tahun 2019 sebagian besar rumah tangga sudah memiliki MCK sendiri. Sebagian besar menggunakan kloset jenis leher angsa. Sebagian besar pembuangan akhir tinja sudah dilakukan di tangki septik. Hanya 10,22 persen yang pembuangan akhirnya menggunakan kolam/sawah/sungai dan 5,91 persen menggunakan lubang tanah.

#### 6.4. Kesehatan Lingkungan

Rumah tinggal yang dapat dikategorikan ke dalam rumah yang layak huni sebagai tempat tinggal harus memenuhi beberapa kriteria kualitas rumah tempat tinggal. Beberapa di antaranya yaitu rumah yang memiliki dinding terluas yang terbuat dari tembok atau kayu, dengan beratapkan beton, genteng, sirap, seng maupun asbes, dan memiliki lantai terluas bukan tanah.

Gambar 6.5 Persentase Rumah Tangga Menurut Beberapa Indikator Kualitas Perumahan di Kabupaten Magelang, 2017-2019



Sumber: BPS, Statistik Kesejahteraan Rakyat 2019

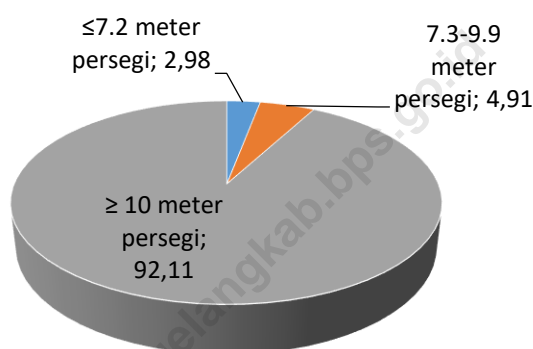
Berdasarkan data Susenas, rumah tangga di Kabupaten Magelang sudah beratap beton, genteng, sirap, seng dan asbes. Tidak ada rumah tangga yang beratap bambu, sirap, kayu, jerami, daun dan rumbia. Hal ini menunjukkan bahwa tempat tinggal penduduk Kabupaten Magelang sudah berkualitas. Hal ini ditunjukkan dengan lantai rumah bukan tanah untuk tahun 2019 sebesar 88,81 persen. Ini berarti hanya 11,19 persen rumah tangga yang memiliki lantai tanah. Dibanding tahun 2018, rumah tangga dengan lantai bukan tanah meningkat 0,42 poin. Demikian juga dengan kondisi dinding pada perumahan di Kabupaten Magelang. Dinding rumah terluas tembok dan kayu pada rumah tangga di Kabupaten Magelang tahun 2019 sebesar 96,71 persen, sisanya 3,29 persen dinding terluasnya berupa bambu, anyaman bambu, dan lainnya.

Selain kedua indikator sebelumnya, indikator lain yang digunakan untuk melihat kualitas perumahan untuk rumah tinggal adalah penggunaan atap terluas. Dari hasil Susenas 2017 - 2019 diperoleh bahwa seluruh rumah tinggal di Kabupaten Magelang sudah memenuhi kriteria atap yang layak, yaitu atap terluasnya terbuat dari beton genteng, sirap, seng, ataupun asbes.

Masih ada indikator lain yang dapat digunakan untuk mengukur kualitas perumahan, yaitu luas lantai per kapita. Luas lantai rumah seringkali dianggap sebagai gambaran untuk menilai

kemampuan sosial ekonomi masyarakat. Selain itu, luas lantai juga menentukan tingkat kesehatan penghuninya. Luas lantai yang sempit dapat mengurangi konsumsi oksigen penghuni rumah serta mempercepat proses penularan penyakit. Luas lantai rumah per kapita adalah rata-rata luas lantai untuk setiap anggota rumah tangga atau dengan bahasa matematisnya adalah keseluruhan luas lantai dibagi total penduduk.

Gambar 6.6 Persentase Rumah Tangga Menurut Luas Lantai per Kapita di Kabupaten Magelang, 2019



Sumber: BPS, Profil Tempat Tinggal Provinsi Jawa Tengah 2019

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman Pasal 22 ayat 3 menyatakan bahwa luas lantai rumah tunggal dan rumah deret memiliki ukuran paling sedikit 36 (tiga puluh enam) meter persegi. Jika satu bangunan rumah dengan luas lantai ini dihuni oleh 5 orang, maka luas per kapita yang dianjurkan oleh Undang-Undang ini adalah paling tidak sebesar 7,2 meter persegi. Menurut *World Health Organization* (WHO) serta *American Public Health Organization* (APHA) yang telah disesuaikan dengan kondisi di Indonesia, ukuran luas lantai yang ideal digunakan per orang minimal adalah 10 meter persegi.

Secara umum, dapat dikatakan bahwa pada 2019, lebih dari 95 persen rumah tangga di Kabupaten Magelang bertempat tinggal di rumah dengan luas lantai per kapita 7,2 meter persegi atau lebih. Rumah tinggal dengan luas lantai per kapita 7,2 meter persegi atau lebih merupakan ukuran ideal yang disyaratkan menurut Undang-Undang. Sementara itu, berdasarkan kriteria yang

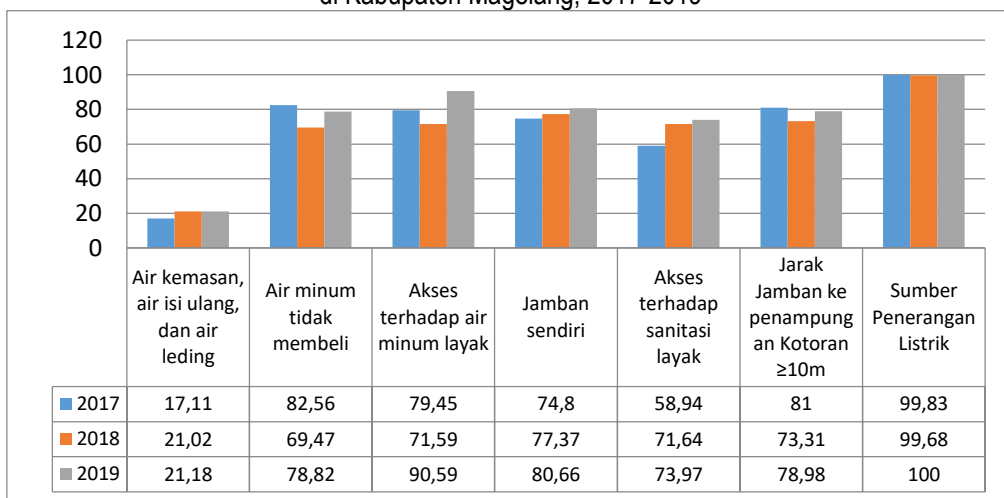
disyaratkan oleh WHO dan APHA terdapat 92,11 persen rumah tangga di Kabupaten Magelang tinggal di rumah dengan luas lantai per kapita 10 meter persegi atau lebih.

Kualitas dan kenyamanan rumah tinggal dapat ditentukan dari kelengkapan fasilitas suatu rumah tinggal. Termasuk dalam kelengkapan fasilitas tersebut adalah tersedianya air bersih, sanitasi yang layak, serta penerangan yang baik. Air bersih merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi rumah tangga dalam kehidupan sehari-hari. Ketersediaan dalam jumlah yang cukup terutama untuk keperluan minum dan masak merupakan tujuan dari program penyediaan air bersih yang terus menerus diupayakan pemerintah.

Penyediaan air bersih bagi masyarakat merupakan tugas pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan, “Bumi dan air kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat.”

Pada 2019, rumah tangga di Kabupaten Magelang yang menggunakan air kemasan, air isi ulang, dan air leding sebagai sumber air minum dan masak mencapai 21,18 persen, mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Dari air minum yang dipakai oleh rumah tangga di Kabupaten Magelang, sebanyak 82,56 persen di tahun 2019 tidak membeli.

Gambar 6.7 Persentase Rumah Tangga Menurut Beberapa Fasilitas Perumahan di Kabupaten Magelang, 2017-2019



Sumber: BPS, Profil Tempat Tinggal Provinsi Jawa Tengah 2019

Air minum layak sesuai dengan metadata indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals (SDGs)* didefinisikan sebagai air minum yang terlindungi meliputi air leding (keran), keran umum, hidran umum, terminal air, penampungan air hujan (PAH) atau mata air dan sumur terlindung, sumur bor atau sumur pompa yang jaraknya minimal 10 meter dari pembuangan kotoran, penampungan limbah, dan pembuangan sampah. Tidak termasuk air kemasan, air isi ulang, air dari penjual keliling, air yang dijual melalui tangki, air sumur tidak terlindungi, mata air tidak terlindung dan air permukaan (seperti sungai, danau, waduk, kolam atau irigasi). Definisi tersebut merupakan pendekatan untuk mengukur pencapaian target global memberikan akses air minum universal dan layak yang aman dan terjangkau bagi semua pada tahun 2011. Banyaknya rumah tangga di Kabupaten Magelang yang memiliki akses terhadap air minum layak sebesar 90,59 persen tahun 2019, naik 19 poin dibanding tahun 2018.

Penyediaan sarana jamban merupakan bagian dari usaha sanitasi yang cukup penting peranannya dalam menunjang kesehatan. Jika ditinjau dari sudut kesehatan lingkungan, pembuangan kotoran manusia yang tidak saniter akan mencemari lingkungan terutama tanah dan sumber air. Selain itu juga akan menyebabkan berbagai macam penyakit seperti thypus, disentri, kolera dan sebagainya. Dari hasil Susenas 2019, sebanyak 78,98 persen rumah tangga di mana jarak jamban ke penampungan kotoran lebih dari 10 meter, naik 5,67 poin dibanding tahun 2018.

Berdasarkan metadata Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) fasilitas sanitasi layak adalah fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan, antara lain kloset menggunakan leher angsa, tempat pembuangan akhir tinja menggunakan tangki septi (*septic tank*) atau Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL), dan fasilitas sanitasi tersebut digunakan oleh rumah tangga sendiri atau bersama dengan rumah tangga lain tertentu. Indikator ini dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan rakyat dari aspek kesehatan (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2018). Sebanyak 73,97 persen rumah tangga di Kabupaten Magelang memiliki sanitasi layak naik 2,33 poin dibanding tahun 2018.

Fasilitas perumahan lainnya yang tidak kalah penting adalah penerangan. Sumber penerangan yang ideal adalah yang berasal dari listrik (PLN dan non-PLN), karena cahaya listrik lebih terang dibandingkan sumber penerangan lainnya. Berdasarkan hasil Susenas 2019, rumah tangga pengguna listrik di Kabupaten Magelang mencapai 100 persen.

## BAB 7 KEMISKINAN

Secara umum, keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari perkembangan penurunan tingkat kemiskinan. Tingkat kemiskinan merupakan ukuran kesejahteraan masyarakat yang telah digunakan secara meluas di berbagai negara, di samping ukuran-ukuran lain seperti PDB. Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan tingkat emisi CO<sub>2</sub> (Nasution, 2016). Penurunan tingkat kemiskinan di Indonesia dalam satu dekade terakhir cenderung melambat (Bank Dunia, 2016). Penurunan kemiskinan yang melambat ini mengindikasikan bahwa pembangunan di Indonesia belum optimal.

Tingkat kemiskinan sebagai indikator kesejahteraan masyarakat dipengaruhi oleh tingkat pendapatan dan pola penggunaannya (Arifin dan Simatupang, 1988). Masyarakat berpendapatan rendah akan mengalokasikan pendapatannya sebagian besar untuk memenuhi kebutuhan makanan dibandingkan bukan makanan. Sejalan dengan hal tersebut, Rambe (2008) menuturkan salah satu indikator kesejahteraan keluarga adalah dengan mengukur besarnya pengeluaran. Sementara itu, BPS mengukur kesejahteraan masyarakat dengan menggunakan batas garis kemiskinan, didasarkan pada data konsumsi serta pengeluaran makanan dan bukan makanan.

Secara formal, dengan pendekatan *basic needs approach*, BPS (2016: 8) mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan, yaitu sejumlah 2 100 kilo kalori per kapita perhari, dan kebutuhan dasar bukan makanan, berupa sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, transportasi dan kebutuhan dasar lain. Kebutuhan pokok minimum yang dimaksud dalam definisi tersebut merupakan standar yang diterjemahkan secara finansial dalam satuan moneter sebagai suatu garis kemiskinan. Seseorang akan dikatakan miskin jika pengeluarannya di bawah standar garis kemiskinan yang telah ditentukan.

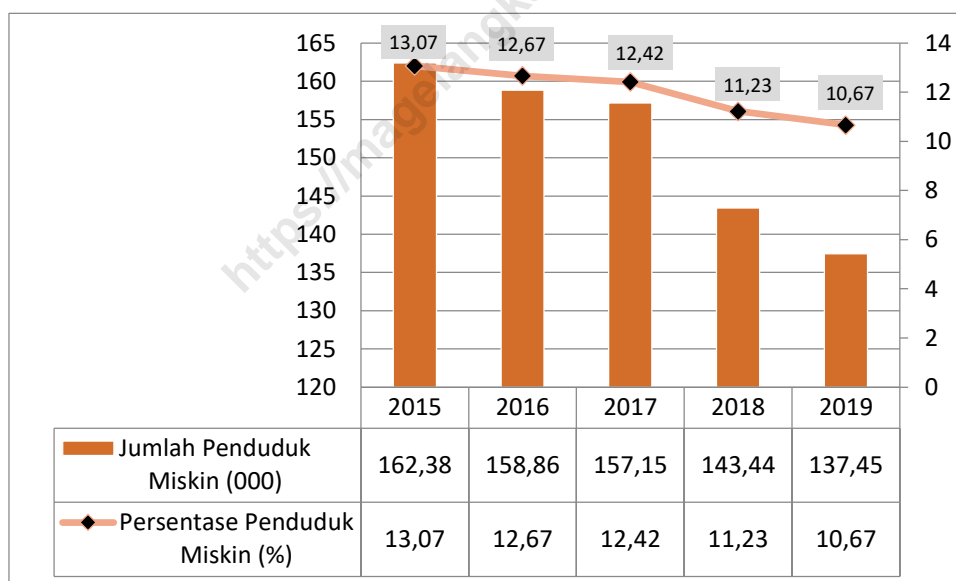


Kemiskinan di suatu wilayah dapat dijelaskan melalui beberapa indikator antara lain jumlah penduduk miskin, persentase penduduk miskin, garis kemiskinan, indeks kedalaman kemiskinan, indeks keparahan kemiskinan, serta karakteristik penduduk miskin itu sendiri berdasarkan fasilitas tempat tinggal, tingkat pendidikan, status pekerjaan, status kesehatan dan lainnya.

## 7.1. Perkembangan Penduduk Miskin

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Magelang selama 5 tahun terakhir terlihat fluktuatif namun cenderung menurun. Begitu pula dengan proporsi penduduk miskin di setiap tahunnya. Pada 2015 dan 2016, persentase penduduk miskin di Kabupaten Magelang hampir mencapai 13 persen. Selanjutnya, pada 2016 proporsi tersebut turun, hingga tahun 2019 penduduk miskin mencapai 10,67 persen.

Gambar 7.1 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Magelang, 2015-2019



Sumber: BPS, Kabupaten Magelang dalam Angka 2020

Selama 2019, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Magelang mencapai lebih dari 137,45 ribu jiwa dengan proporsi 10,67 persen, sedangkan pada 2018 jumlah penduduk miskin mencapai lebih dari 143,44 ribu jiwa dengan proporsi 11,23 persen. Kendati secara angka mengalami penurunan dibandingkan 2018, bahasan mengenai kemiskinan, tidak hanya berhenti pada berapa jumlah dan

proporsinya, namun perlu diketahui juga garis kemiskinan, serta sejauh mana kedalaman dan keparahan dari kemiskinan itu sendiri.

## **7.2. Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan, dan Indeks Keparahan Kemiskinan**

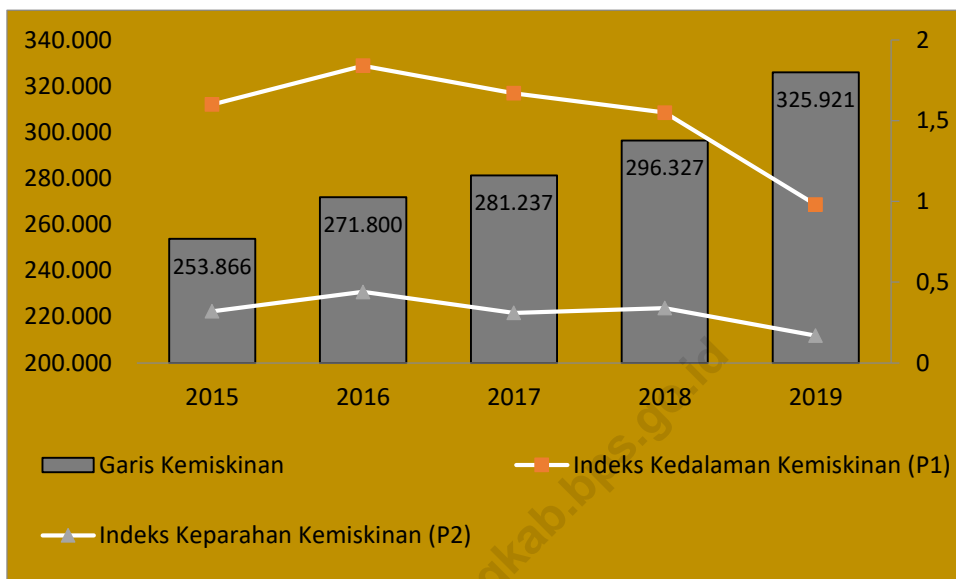
Garis kemiskinan di Kabupaten Magelang menunjukkan tren yang terus meningkat. Sejak 2015-2019, garis kemiskinan di Kabupaten Magelang meningkat secara bertahap, dari Rp 253,866,- per kapita per bulan pada 2015, menjadi Rp 325,921,- per kapita per bulan pada 2019. Meningkatnya garis kemiskinan tersebut besar kemungkinan dipengaruhi oleh meningkatnya gaya hidup penduduk serta meningkatnya harga kebutuhan pokok dari tahun ke tahun.

Sudah disebutkan sebelumnya, bahwa persoalan kemiskinan tidak hanya seputar jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi yang tidak kalah penting untuk diperhatikan adalah Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2), Indeks kedalaman kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan.

Perkembangan indeks kedalaman kemiskinan di Kabupaten Magelang selama 5 tahun terakhir, sangat fluktuatif. Pada 2015, indeks kedalaman kemiskinan di Kabupaten Magelang adalah 1,60 sedangkan saat 2016 indeks tersebut naik menjadi 1,84, dan tahun 2019 ini indeks kedalaman kemiskinan merupakan indeks terendah selama 5 tahun terakhir yaitu sebesar 0,98. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.

Seiring dengan nilai P1, indeks keparahan kemiskinan di Kabupaten Magelang selama 5 tahun terakhir juga menunjukkan pola yang sama. Pada 2019, nilai indeks tersebut mengalami penurunan, menjadi 0,17 yang sebelumnya sebesar 0,34 pada tahun 2018. Gambaran garis kemiskinan beserta indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan yang terjadi di Kabupaten Magelang selama kurun waktu 2015 hingga 2019 disajikan secara ringkas dalam Gambar 7.2.

Gambar 7.2 Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan, dan Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Magelang, 2015-2019



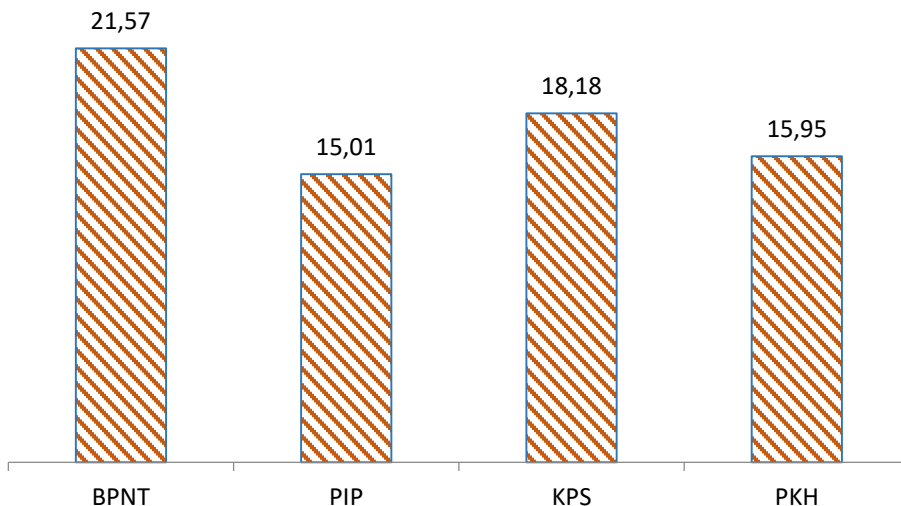
Sumber: BPS, Kabupaten Magelang dalam Angka 2020

Meskipun diketahui bahwa pada 2019 jumlah maupun persentase penduduk miskin di Kabupaten Magelang menurun dibandingkan 2018 diimbangi dengan penurunan indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan. Nilai indeks kedalaman kemiskinan yang cenderung menurun menunjukkan kondisi yang menggembirakan. Rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin mendekati garis kemiskinan atau dengan kata lain, penduduk miskin semakin sejahtera. Begitu pula dengan kesenjangan pengeluaran yang masih ada. Meski demikian, dibutuhkan upaya yang lebih keras untuk mengentaskan mereka dari kemiskinan.

## BAB 8 PERLINDUNGAN SOSIAL

Program perlindungan sosial di Indonesia memegang peran penting dalam upaya mengentaskan kemiskinan serta pembangunan ekonomi. Perlindungan sosial dianggap sebagai instrumen perlindungan bagi masyarakat miskin dan rentan. Masyarakat kurang mampu dan rentan juga harus diberi kesempatan berkontribusi dalam pembangunan ekonomi yang setara di Indonesia. Program perlindungan sosial yang dilakukan oleh pemerintah untuk masyarakat miskin antara lain Beras Miskin (Raskin)/Beras Sejahtera (Rastra), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Perlindungan Sosial (KPS)/Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sosial dari Pemerintah Daerah.

Gambar 8.1 Persentase Rumah Tangga Penerima Program Perlindungan Sosial di Kabupaten Magelang, 2019



Sumber: BPS, Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019

Dari hasil Susenas 2019, sebanyak 21,57 persen rumah tangga di Kabupaten Magelang menerima BPNT. Sebanyak 15,01 persen rumah tangga menerima program Program Indonesia Pintar (PIP). PIP adalah program prioritas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Peserta PIP ini mendapatkan bantuan dana dalam bentuk Kartu Indonesia Pintar (KIP). Sementara rumah tangga penerima KPS sebanyak 18,18 persen. Kartu Perlindungan Sosial adalah kartu yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Sosial dalam rangka program percepatan dan perluasan sosial. Kartu ini berfungsi untuk membantu meringankan hidup rakyat miskin antara lain mendapatkan subsidi beras atau lebih dikenal dengan beras raskin, mendapatkan bantuan pendidikan bagi siswa, dan Program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Pendistribusian Kartu Perlindungan Sosial (KPS) kepada masyarakat sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri tanggal 17 Juni 2014 Nomor 541/3150/SJ Tentang Pelaksanaan Pembagian Kartu Perlindungan Sosial dan Pengaduan Masyarakat.

Rumah tangga penerima PKH tahun 2019 sebanyak 15,95 persen naik 9,04 poin dari tahun 2018. Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, sejak tahun 2007 Pemerintah Indonesia telah melaksanakan PKH. Program Perlindungan Sosial yang juga dikenal di dunia internasional dengan istilah *Conditional Cash Transfers (CCT)* ini terbukti cukup berhasil dalam menanggulangi kemiskinan yang dihadapi di negara-negara tersebut, terutama masalah kemiskinan kronis. Melalui PKH, KM didorong untuk memiliki akses dan memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan dan pendampingan, termasuk akses terhadap berbagai program perlindungan sosial lainnya yang merupakan program komplementer secara berkelanjutan.

## BAB 9 SOSIAL LAINNYA

**P**engaruh perubahan era globalisasi mulai terasa di kehidupan masyarakat saat ini. Perkembangan zaman telah memaksa masyarakat untuk beradaptasi terhadap semua perubahan-perubahan yang terjadi, baik perubahan ke arah positif maupun negatif. Tingkat kebutuhan pun mulai mengalami pergeseran, dari yang semula merupakan kebutuhan sekunder atau tersier menjadi kebutuhan primer. Berlibur atau berwisata, eksistensi di tengah masyarakat, serta akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi adalah beberapa contoh kebutuhan yang kini mulai bergeser menjadi kebutuhan primer.

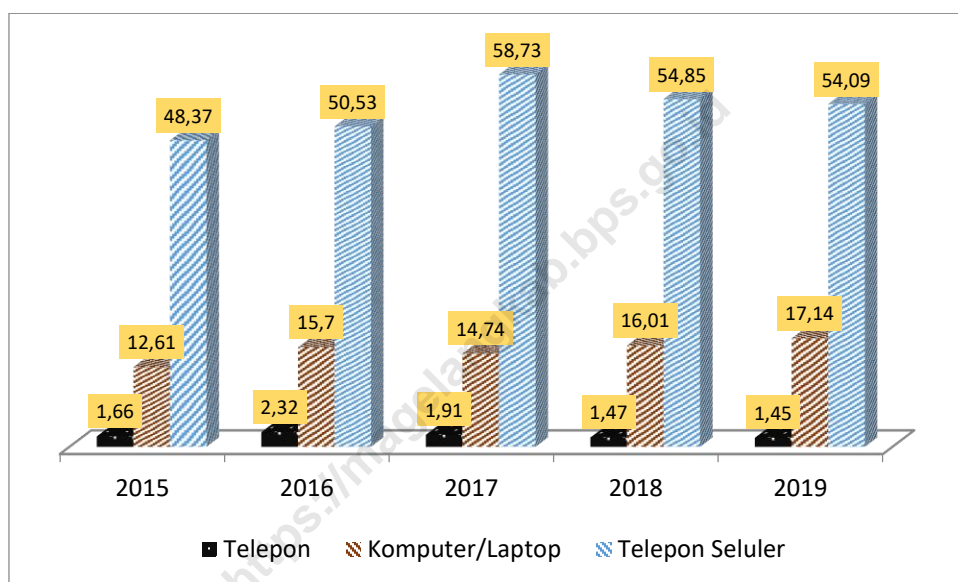
Pertukaran informasi yang cepat antar daerah dan negara menjadi kebutuhan utama yang tidak terhindarkan dalam menunjang keberlangsungan hidup masyarakat. Teknologi yang semakin canggih seolah membuat akses dunia tanpa batas. Penguasaan teknologi seolah menjadi suatu prestise tersendiri, serta indikator kemajuan dari suatu daerah. Arus globalisasi antar wilayah yang semakin deras membuka kesempatan bagi setiap daerah untuk mengembangkan perekonomiannya.

Berdasarkan Susenas 2019, terdapat 1,45 persen rumah tangga di Kabupaten Magelang yang mempunyai akses teknologi informasi dan komunikasi dengan alat komunikasi telepon. Pengguna telepon dari tahun ke tahun semakin menurun, beralih ke penggunaan HP/telepon seluler. Dalam lima tahun terakhir pengguna telepon menurun sebanyak 0,21 poin dari 1,66 persen ke 1,45 persen.

Rumah tangga yang memiliki akses terhadap telepon seluler juga mengalami peningkatan dengan persentase kepemilikan tertinggi HP/telepon seluler pada tahun 2017 sebesar 58,73 persen, tetapi kemudian menurun selama dua tahun berturut-turut menjadi sebesar 54,85 persen pada tahun

2018 dan 54,09 persen pada tahun 2019. Persentase rumah tangga dengan telepon seluler jauh lebih tinggi dibandingkan pesawat telepon biasa. Tingginya persentase rumah tangga dengan akses telepon seluler menggambarkan bahwa masyarakat cenderung memilih telepon seluler dibandingkan telepon biasa karena kemudahan mobilitas.

Gambar 9.1 Persentase Rumah Tangga dengan Penguasaan/Kepemilikan Telepon, Telepon Seluler dan Komputer/Laptop di Kabupaten Magelang, 2015-2019



Sumber: BPS, Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Tengah 2019

Seiring arus perkembangan informasi dan teknologi yang semakin deras, masyarakat juga semakin membutuhkan media atau sarana yang dapat menunjang aktivitasnya sehari-hari, termasuk dalam hal penggunaan komputer atau laptop. Selama 2019, terdapat 17,14 persen rumah tangga di Kabupaten Magelang yang menggunakan komputer, baik berupa PC/Dekstop, laptop/notebook, maupun tablet. Meningkat 1,13 poin dibandingkan dengan tahun 2018, Perkembangan teknologi informasi membuat masyarakat semakin membutuhkan peralatan yang menunjang.

## Daftar Pustaka

- Arifin, M dan P. Simatupang. 1988. Pola Konsumsi dan Kecukupan Kalori dan Protein di Pedesaan Sumatera Barat dalam Prosiding Patanas Perubahan Ekonomi Pedesaan Menuju Struktur Ekonomi Berimbang. Pusat Penelitiin Agro Ekonomi.
- Badan Pusat Statistik. 2016. *Indikator Kesejahteraan Rakyat 2016*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat. 2020. *Data Kependudukan Provinsi Kalimantan Barat Menurut Sex Ratio*. Diakses pada <https://dukcapil.kalbarprov.go.id/statistik/sex-ratio> (20 November 2020).
- Hasanah, Hafif. 2014. *Kajian Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pendidikan Masyarakat di Desa Garunglor Kecamatan sukoharjo Kabupaten Wonosobo*. (Skripsi), Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Purwokerto.
- Jefriando, Maikel. 2016. Pertumbuhan Ekonomi RI Kuartal I-2016 Melambat. Diakses pada <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3203475/pertumbuhan-ekonomi-ri-kuartal-i-2016-melambat> (19 Oktober 2016).
- Okriyanto, dkk. 2019. Persepsi Tentang Usia Pernikahan Perempuan dan Jumlah Anak Yang Diharapkan: Mampukah Memprediksi Praktek Pengasuhan Orang Tua?. *Jurnal Ilm. Kel. & Kons* Vol. 12, No.2, hal 87-97.
- Pemerintah Indonesia. 1974. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1. Jakarta : Sekretariat Negara.
- Pemerintah Indonesia. 2012. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 11. Jakarta : Sekretariat Negara.
- Pemerintah Indonesia. 2014. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 35. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Malthus, Thomas Robert. 1826. *Essay on The Principle of Population*. London: John Murray, Albemarle street.



- Notoatmodjo, Soekidjo. 1997. Pendidikan dan Perilaku Kesehatan dalam Ilmu Kesehatan Masyarakat. Jakarta: Rineka Cipta.
- Rambe, Armaini, dkk. 2008. Analisis Alokasi Pengeluaran Dan Tingkat Kesejahteraan Keluarga (Studi di Kecamatan Medan Kota, Sumatera Utara). Jurnal IPB Vol. 1 No. 1 -16
- Wuryandari, Ratna Dewi. 2012. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengeluaran Makanan, Pendidikan, Dan Kesehatan Rumah Tangga Indonesia (Analisis Data Susenas 2011). Jurnal Kependudukan Indonesia Vol.10 No.1, hal 27-42.

<https://magelangkab.bps.go.id>



Sensus  
Penduduk  
2020

# DATA

## MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK  
KABUPATEN MAGELANG**

Jl. Soekarno-Hatta No. 4 Kota Mungkid 56511,  
Telp (62-293) 788143, Faks (62-293) 788143,  
E-Mail : [bps3308@bps.go.id](mailto:bps3308@bps.go.id) Homepage: <https://magelangkab.bps.go.id>

ISBN 978-623-94353-8-7



9 786239 435387